



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

614
Ind
K

Kementerian Kesehatan Bek3rja

Laporan Kinerja
2015-2017

Kementerian Kesehatan Bek3rja

Laporan Kinerja
2015 - 2017

PENGARAH

Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M (K)
(Menteri Kesehatan)

PENANGGUNG JAWAB

- dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes (Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan)
- Drs. Purwadi, Apt, MM, ME (Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan)
- dr. Anung Sugihantono, M. Kes (Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat)
- dr. Bambang Wibowo, Sp. OG(K), MARS (Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan)
- Dra. Maura Linda Sitanggang, Apt., Ph.D. (Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan)
- dr. H. Mohamad Subuh, MPPM (Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)
- drg. Usman Sumantri, M.Sc (Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan)
- dr. Siswanto, MHP, DTM (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan)

KETUA

drg. Oscar Primadi, MPH
(Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat)

WAKIL KETUA

drg. Widyawati, MKM
(Kepala Bagian Pelayanan Masyarakat,
Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat)

SEKRETARIS

Santy Komalasari, S.Kom, MKM (Kepala Sub Bagian
Penerbitan dan Perpustakaan,
Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat)

ANGGOTA

- Prawito, SKM, MM
- Okto Rusdianto, ST
- Rina Wahyu Wijayani, SE, MKM
- Giri Inayah Abdullah, S.Sos, MKM
- Sumardiono, SE
- Resty Kiantini, SKM, M.Kes
- Mety Setyowati, SKM
- Anjari, S.Kom, SH, MARS
- Didit Tri Kertapati, SH
- Indah Wulandari
- Endang Retnowaty
- Faradina Ayu

EDITOR

- Indra Rizon, SKM, M.Kes
- Busroni, S.IP

DESAIN ISI DAN COVER

- Agus Riyanto
- Khalil Gibran Astarengga

KREDIT FOTO

- Tim liputan dan dokumentasi Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
- Humas Unit Utama
- Komunitas Fotografi Kesehatan

Katalog Dalam Terbitan Kementerian Kesehatan RI.

614 Indonesia. Kementerian Kesehatan RI. Sekretariat Jenderal
Ind Kementerian Kesehatan Bekerja 2015-2017
k — Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. 2018

23 cm x 23 cm

ISBN 978-602-416-369-3



Kerja Bersama, Sehat Merata

Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia tetap menjadi pegangan bagi pengabdian sektor kesehatan sebagai bentuk pelaksanaan Nawa Cita kelima. Berbagai tantangan dalam membangun masyarakat dan keluarga sehat terbayar dengan capaian terukur yang akseleratif.

Realisasi Program Indonesia Sehat periode 2015-2017 benar-benar menggambarkan hasil pembangunan kesehatan yang signifikan.

Program prioritas Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), Pemberian Makanan Tambahan (PMT), dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dilaksanakan secara efektif berkat partisipasi dari berbagai pihak. Mulai dari Presiden

RI Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, para istri Kabinet Kerja dalam OASE, lintas Kementerian/Lembaga, pihak swasta hingga individu-individu dalam keluarga semua mengambil peran penting.

Kolaborasi tersebut membuahkan hasil yang manis selama tiga tahun terakhir. Pemanfaatan JKN-KIS secara keseluruhan pun kian meningkat. Pada tahun 2015 sebesar 146,7 juta jiwa menjadi sebesar 192,9 juta pada setahun berikutnya dan sudah mencapai 106,2 juta jiwa pada triwulan kedua tahun 2017.

Dari sisi sumber daya manusia kesehatan, upaya pemenuhannya dapat dilihat dari capaian penempatan Nusantara Sehat berbasis tim sebanyak 694 orang (2015), meningkat menjadi 728 orang (2016), kemudian pada 2017 tercatat sebanyak 1.064 orang.

Agar pemanfaatan SDM kesehatan berjalan optimal, Perpres Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS), mengatur setiap dokter spesialis lulusan pendidikan profesi program dokter spesialis dari perguruan

tinggi negeri di dalam negeri dan perguruan tinggi di luar negeri wajib mengikuti WKDS. Pencapaian hingga Desember 2017, Kemenkes telah mengirimkan 870 tenaga WKDS di 370 Kabupaten/Kota.

Kemenkes pun menggulirkan pembangunan kesehatan di wilayah perbatasan. Melalui Surat Keputusan Menkes No. HK.02.02/Menkes/367/2015 telah ditetapkan sebanyak 48 Kabupaten/Kota dan 124 Puskesmas Sasaran Program Prioritas Nasional Pelayanan Kesehatan di Daerah Perbatasan tahun 2015-2019. Oleh karena itu, Kemenkes pada tahun 2017 melakukan berbagai upaya terobosan guna mendukung pelayanan kesehatan di 124 Puskesmas Perbatasan. Salah satunya adalah pemenuhan sarana dan prasarana di 124 Puskesmas daerah perbatasan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) afirmasi tahun 2017.

Pembangunan sarana dan prasarana dari tingkat dasar, yaitu pada tingkat puskesmas hingga rujukan pada rumah sakit serta upaya penyediaan obat di seluruh wilayah

Indonesia melalui DAK bidang Kesehatan, dilakukan secara masif. Tercatat telah dilakukan renovasi sebanyak 2.272 Puskesmas, 1.200 pembangunan gedung atau peningkatan, 224 pembangunan baru Puskesmas, penyediaan 154 Pusling Air serta 802 Pusling Roda 4 dan pengadaan 3.607 Kendaraan Roda 2. Penambahan sebanyak 704 mobil ambulans pun telah dilakukan.

Peningkatan sarana dan prasarana disasar bagi 110 RS Rujukan Regional, 20 RS Rujukan Provinsi, dan 4 RS Rujukan Nasional serta 413 RSUD lainnya. Disertai penyediaan obat di 9.274 Puskemas dan pembangunan 98 Instalasi Farmasi.

Presiden RI berkeinginan membangun kualitas bangsa dengan turut membagikan PMT Balita Kurus. Tercatat dalam kurun waktu tiga tahun telah dibagikan 2.014,1 ton untuk 186.481 balita kurus (2015), 5.554,7 ton bagi 514.320 balita kurus (2016) dan 5.994,0 ton untuk 555.000 balita kurus pada tahun 2017.

Upaya kami membangun sektor kesehatan secara terukur

kepada sasaran yang paling membutuhkan, melalui kesadaran dari setiap individu itu sendiri. Maka, Kemenkes menjadi *leading sector* melalui program terobosan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Gerakan ini bertujuan untuk menurunkan beban penyakit, menghindari terjadinya penurunan produktivitas penduduk, dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan. Gerakan kolaboratif dari seluruh *stakeholders* ini pun telah dicanangkan di 34 Provinsi dan 365 Kabupaten/Kota.

Derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat selalu kami prioritaskan dalam Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Target program ini hingga tahun 2019 diharapkan menjangkau sekitar 9.754 Puskesmas di 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota, demi tercapai kondisi masyarakat Indonesia yang sehat, mandiri, dan sejahtera secara merata.

Sungguh sebuah kebanggaan tersendiri jika capaian-capaian kebersamaan tersebut dapat

dirangkum dalam sebuah buku kinerja. Untuk itu, kami berharap terbitnya buku *Kementerian Kesehatan Bekerja 2015-2017* menjadi pijakan sekaligus refleksi pembangunan kesehatan yang berkelanjutan.

Tetaplah Bersemangat Membangun Indonesia Sehat!

Jakarta, Januari 2018



Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek,
Sp.M(K)

Menteri Kesehatan RI





Ki-ka:

dr. H. Mohamad Subuh, MPPM
Direktur Jenderal Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit

Drs. Purwadi, Apt, MM, ME
Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan

dr. Bambang Wibowo, Sp.OG(K), MARS
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan

dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan

dr. Anung Sugihantono, M. Kes
Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat

Dra. Maura Linda Sitanggang, Apt., Ph.D.
Direktur Jenderal Kefarmasian dan
Alat Kesehatan

drg. Usman Sumantri, M.Sc
Kepala Badan Pengembangan dan
Pemberdayaan SDM Kesehatan

dr. Siswanto, MHP, DTM
Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Kesehatan



Komitmen Menjaga Kepercayaan

Seiring dengan Tiga Tahun Kerja Jokowi-JK, Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) sebagai kementerian dengan sejumlah program prioritas Nawa Cita telah bekerja melampaui target capaian.

Presiden RI selalu mendukung Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk mengakselerasi nutrisi bergizi bagi anak bangsa. Tak segan, beliau sekaligus menyosialisasikan bersama Menkes agar para ibu hamil menjaga gizi makanannya supaya melahirkan buah hatinya dengan selamat dan sehat.

Kepercayaan luar biasa besar tersebut berada di pundak Kemenkes selaku regulator yang memayungi para tenaga kesehatan di seantero negeri. Melalui program Kartu Indonesia Sehat dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), kami selalu menyebarkan semangat sehat berkemandirian.

Tentunya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui program-program berkelanjutan memerlukan anggaran berimbang. Kemenkes dipercayai untuk mengelola dana pembangunan kesehatan sebesar

Rp 58,27 triliun pada tahun 2017. Sebelumnya anggaran bidang kesehatan tahun 2016 naik hingga Rp 57,5 triliun dibandingkan tahun 2015 yang mencapai Rp 47,8 triliun.

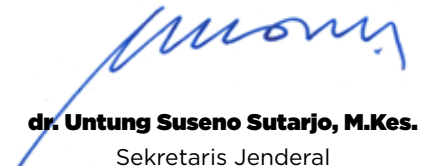
UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 171 ayat 1 mengamanatkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal 5 % dari APBN. Untuk itulah, kepercayaan mengelola anggaran tersebut harus dilaksanakan dengan amanah.

Melalui *Buku Kementerian Kesehatan Bekerja 2015-2017*, kami berupaya menjaga akuntabilitas dan

kepercayaan publik lewat laporan tiga tahun kinerja.

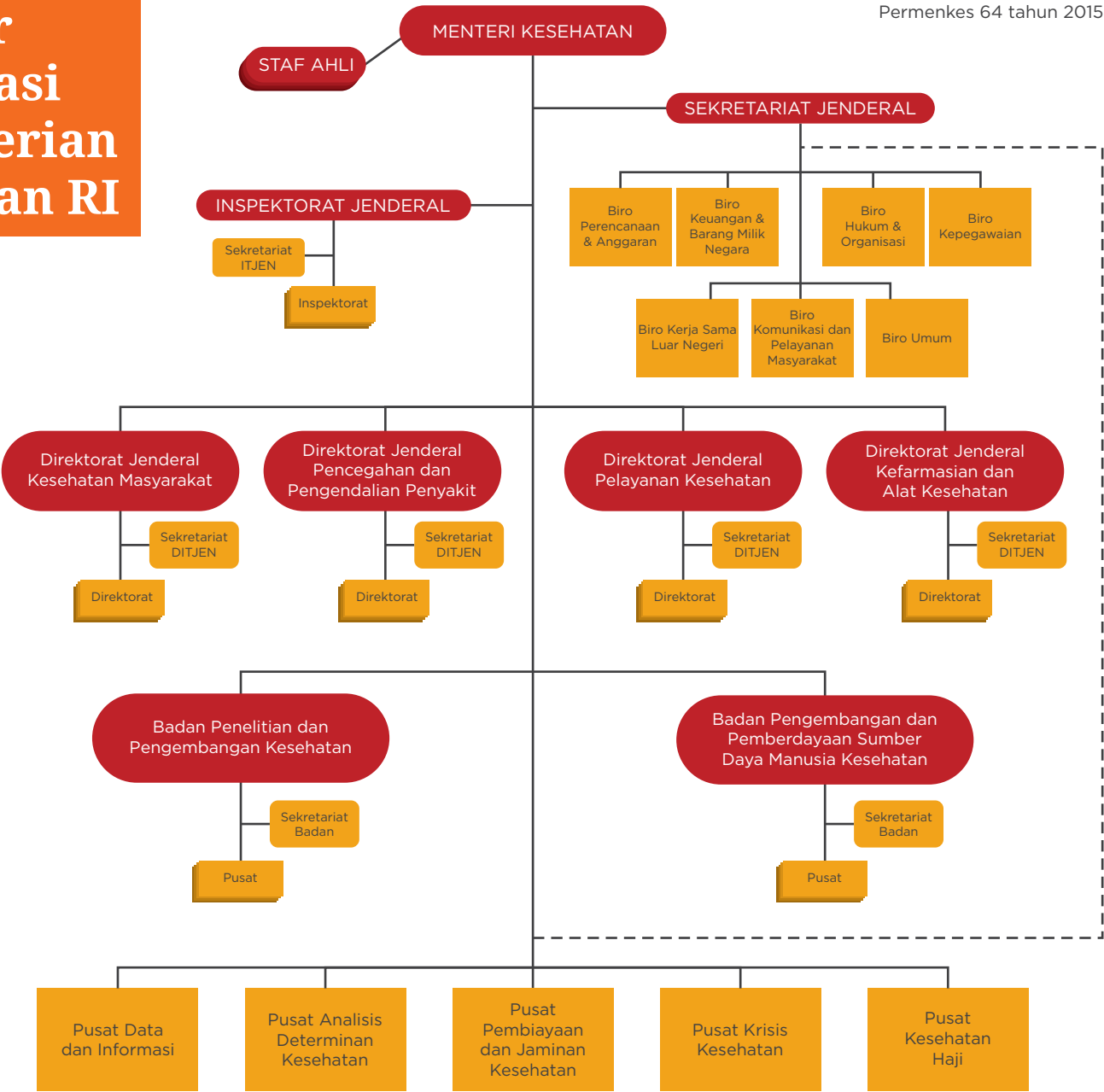
Kualitas belanja anggaran kesehatan akan terlihat dalam buku melalui visual foto infrastruktur yang ditambah dengan infografis capaian, dan data-data terkait sarana prasarana kesehatan dari para pelaksana teknis di daerah, unit kerja maupun pusat. Semoga capaian kinerja yang tersaji dalam buku ini berdampak nyata bagi peningkatan taraf kesehatan keluarga di Indonesia!

Jakarta, Januari 2018


dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes.
Sekretaris Jenderal

Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan RI

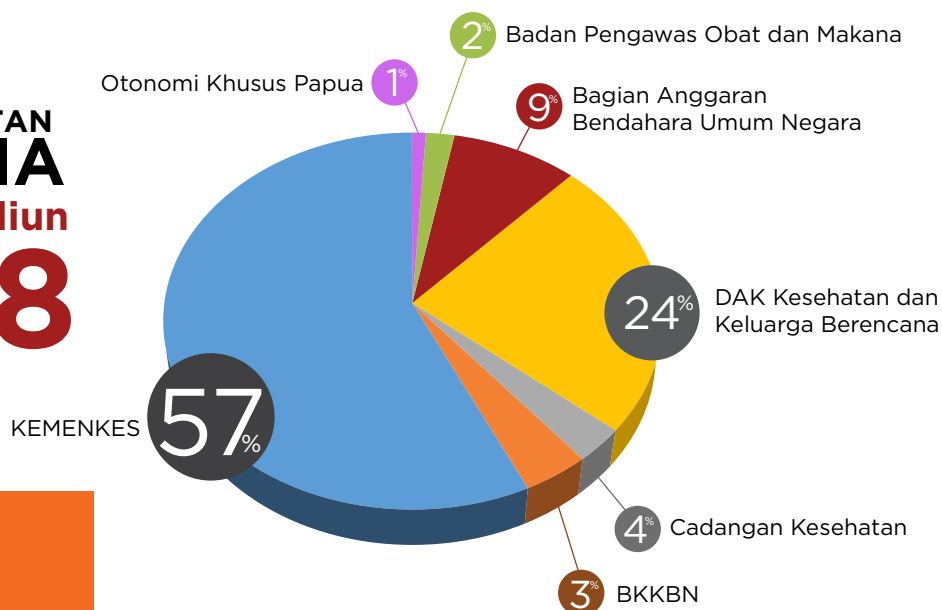
Permenkes 64 tahun 2015



- Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan
- Staf Ahli Bidang Desentralisasi Kesehatan
- Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi
- Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan

ANGGARAN KESEHATAN
DI INDONESIA
105,8 triliun

Anggaran
Kesehatan 2017



44%
Belanja Bantuan Sosial
Penerima Bantuan
Iuran (PBI)



38%
Belanja Barang



12%
Belanja Pegawai



6%
Belanja Modal

ANGGARAN
KEMENKES

58,27 triliun

Dari 57% Anggaran Kesehatan yang dialokasikan untuk Kemenkes dibagi kembali peruntukannya

Produk Hukum
Kementerian
Kesehatan 2017

Rancangan
Undang-Undang
**Kekarantina
Kesehatan
Wabah**

Rancangan Peraturan Pemerintah

**Penelitian dan
Pengembangan
Kesehatan
Perencanaan
Pengadaan
Pendayagunaan
Pembinaan dan
Pengawasan Tenaga
Kesehatan Serta
Penaatan Sanksi
Administratif
Pengelolaan
Tenaga
Kesehatan**



Peraturan Presiden

**Perpres No. 4 tahun
2017 tentang Wajib
Kerja Dokter Spesialis**

Perpres No. 90 Tahun
2017 tentang Konsil
Tenaga Kesehatan
Indonesia

Instruksi Presiden

**Inpres No. 1 Tahun
2017 tentang
Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat**

Inpres No. 3 Tahun 2017
tentang Peningkatan
Efektivitas
Pengawasan Obat dan
Makanan

Keputusan Menteri
Kesehatan

**151
KepMenkes**

&

Peraturan Menteri Kesehatan

**53
PerMenkes**

sampai dengan
30 Nov 2017

Daftar Isi



- 3** Sambutan Menteri
- 8** Sambutan Sekjen
- 10** Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan RI
- 11** Anggaran Kesehatan 2017
- 12** Produk Hukum Kementerian Kesehatan 2017

Paradigma Sehat

- 20** Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
- 28** Peregangan
- 31** Tes IVA
- 32** Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)
- 38** Kesehatan Ibu dan Anak
- 40** Imunisasi
- 42** Eliminasi Penyakit Tular Vektor
- 44** Sanitasi Lingkungan
- 46** Badan Litbang Kesehatan
- 47** Gerakan Nasional Bude Jamu



Penguatan Layanan Kesehatan

- 52** Pembangunan 124 Puskesmas di Daerah Perbatasan
- 55** Puskesmas Wahana DLP
- 56** Kerjasama Puskesmas, RS dan UTD
- 57** Inovasi Rumah Sakit
- 60** NCC 119
- 62** Internsip
- 64** Nusantara Sehat
- 68** Nusantara Sehat Penugasan Individu
- 70** Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS)
- 72** Pengendalian Penyakit Menular Langsung
- 73** Instalasi Farmasi



Daftar Isi



Jaminan Kesehatan Nasional

- 76** Mewujudkan JKN
- 77** Fasilitas Kesehatan yang sudah bekerjasama dalam mewujudkan JKN
- 78** Jumlah Kepesertaan JKN

Kaleidoskop

- 82** Operasi Bayi Kembar Siam Berhasil Dipisah
- 83** Kemenkes dan BPJS Kesehatan Tandatangani Peraturan Bersama Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran KBKP Pada FKTP
- 84** Menkes Lepas 9 Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) di NTT
- 85** Tugas Tim Nusantara Sehat Batch I & II Berakhir
- 86** Mudik Lebaran
- 87** Kemenkes Bentuk Gugus Tugas Pengawasan Iklan Kesehatan
- 88** Seleksi CPNS Kemenkes



Penghargaan

- 89** Simulasi Pandemi Influenza
- 90** Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
- 91** Eliminasi Filariasis
- 92** Asia Pasific Food Forum (EAT) Gemari & Isi Piringku
- 93** Puncak Peringatan HKN Ke-53
- 95** Indonesia Mampu Produksi Sten dan Balon Kateter
- 96** Kemenkes Berlakukan ORI Difteri di 3 Propinsi
- 97** Kemenkes Libatkan 1.963 Petugas Penyelenggara Kesehatan Haji 2017





Paradigma Sehat



Foto: Zenvan Santoso



Foto: Supri Agus

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)

Presiden RI Joko Widodo mendukung perbaikan lingkungan dan perubahan perilaku masyarakat yang lebih sehat. Kolaborasi antar kementerian dan lembaga menuju pembangunan sehat diwujudkan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).



Gerakan nasional yang diprakarsai oleh Presiden RI ini dicanangkan dalam rangka penguatan pembangunan kesehatan yang mengedepankan upaya promotif-preventif, tanpa mengesampingkan upaya kuratif-rehabilitatif dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dalam memasyarakatkan paradigma sehat

Menko Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan RI Puan Maharani dalam Pencanangan GERMAS di
D.I Yogyakarta (15/11/2016)



Gerakan Masyarakat Hidup Sehat adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup

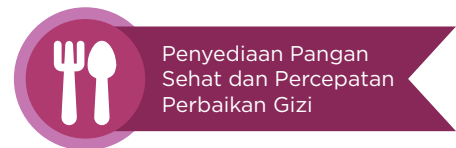
Regulasi yang ada antara lain **INPRES NO.1 Tahun 2017** yang memiliki 6 (enam) ruang lingkup



Peningkatan Aktivitas Fisik



Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit



Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi



Peningkatan Perilaku Hidup Sehat



Peningkatan Kualitas Lingkungan



Peningkatan Edukasi Hidup Sehat

Tahun 2016 - 2017 **GERMAS** difokuskan pada kegiatan



Melakukan aktivitas fisik



Konsumsi sayur dan buah



Memeriksa kesehatan secara berkala

Dan sebagai tindak lanjut **INPRES NO.1 Tahun 2017** tersebut maka telah diterbitkan



Permendagri No. 32 Tahun 2017
Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018



Surat Edaran Mendagri No 440/2797/SJ
Tentang Dukungan Implementasi Inpres 1/2017



Surat Edaran Gubernur Jawa Timur, Jawa Tengah, Jambi, DIY, NTB dan Bali Tahun 2017



Ingub Kepri No 1 Tahun 2017

Telah dilakukan di
 **34**
 PROVINSI

dan dicanangkan di
 **365**
 Kabupaten/Kota



PELAKSANAAN GERMAS





- Bentuk logo menggambarkan masyarakat Indonesia yang memiliki hidup sehat melalui aktivitas fisik serta deteksi dini penyakit.
- Logo menggunakan konsep pita yang bersambung dengan 4 warna yang berbeda, menggambarkan kerjasama serta komitmen kementerian/lembaga, dunia usaha, organisasi Masyarakat dan akademisi dalam menciptakan masyarakat sehat.
- Warna-warna yang dipergunakan pada logo mencerminkan warna-warna dari beberapa makanan sehat seperti buah-buahan dan sayuran yang dapat dikonsumsi sebagai salah satu cara untuk wujudkan hidup sehat

IMPLEMENTASI KEGIATAN GERMAS

di Kementerian / Lembaga lainnya



Kementerian Dalam Negeri

Mengkoordinasikan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat



Kementerian Pemuda dan Olahraga

Meningkatkan kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Meningkatkan kegiatan Upaya Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR), dan mendorong Sekolah Ramah Anak

Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik / olahraga di sekolah dan penyediaan sarana sanitasi sekolah

Meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat



Kementerian Agama

Melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat;

Memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren dan Upaya Kesehatan Madrasah

Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik / olahraga di madrasah dan penyediaan sarana sanitasi madrasah



Kementerian Pertanian

Mengawasi keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya

Mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk tanaman sayur dan buah



Kementerian Kelautan dan Perikanan

Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat

Mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan



Kementerian Kesehatan

Melaksanakan kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat serta meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif, serta aktivitas fisik

Meningkatkan pelaksanaan deteksi dini di Puskesmas dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini di instansi pemerintah dan swasta



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Mendorong penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum

Mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya

Memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum



Kementerian Perhubungan

Mendorong kawasan bebas kendaraan bermotor (car free day) untuk memfasilitasi kegiatan aktivitas fisik masyarakat

Mendorong konektivitas antarmoda transportasi publik termasuk penyediaan "park and ride" untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat



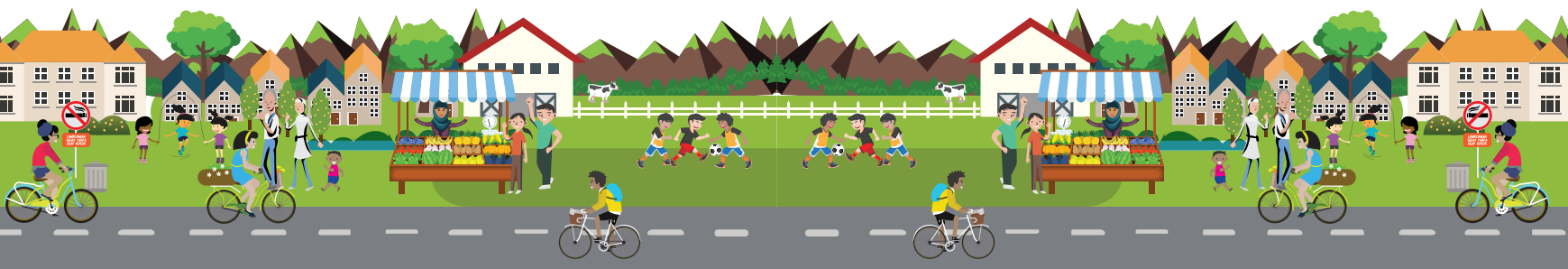
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Mengendalikan pencemaran badan air

Mendorong penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi pertambangan yang berdampak pada kesehatan

Mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah

Mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan





Kementerian Perdagangan

Meningkatkan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan produk tembakau dan minuman beralkohol serta bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan

Meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri



Kementerian Keuangan

Melakukan kajian peningkatan harga, cukai, dan pajak produk tembakau dan minuman beralkohol

Menyusun skema insentif bagi daerah yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat secara optimal



Kementerian Ketenagakerjaan

Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan / deteksi dini penyakit pada pekerja

Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang ASI, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja, dan menerapkan kawasan tanpa rokok



Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah untuk menyediakan sarana aktivitas fisik dan melaksanakan olahraga serta deteksi dini penyakit secara rutin

Mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah untuk menyediakan sarana ruang ASI, menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), serta konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam atau luar kantor



Kementerian Komunikasi dan Informatika

Melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup sehat

Melakukan kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk pengawasan terhadap iklan / tayangan yang tidak mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat



Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM)

Meningkatkan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat bagi keluarga, perempuan, dan anak



Badan Pengawas Obat dan Makanan

Menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat

Memperkuat dan memperluas pengawasan dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)



BPJS Kesehatan

Meningkatkan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit



Gubernur

Menyusun dan menetapkan kebijakan daerah yang diperlukan untuk pelaksanaan GERMAS di wilayahnya

Melakukan fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan GERMAS di kabupaten /kota di wilayahnya

Melaporkan pelaksanaan GERMAS kepada Menteri Dalam Negeri



Bupati / Walikota

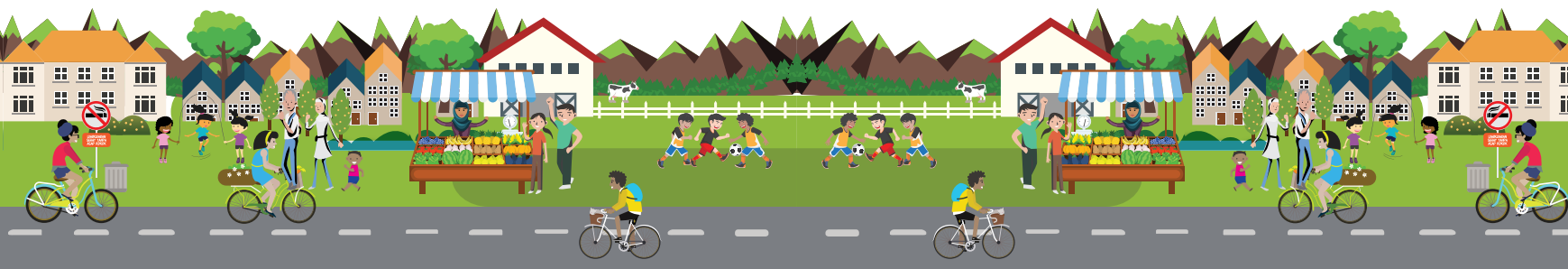
Menyediakan sarana aktivitas fisik, ruang terbuka publik, kawasan bebas kendaraan bermotor (car free day), jalur sepeda, dan jalur pejalan kaki yang representatif dan aman

Melaksanakan kegiatan pemanfaatan pekarangan rumah untuk tanaman sayur dan buah

Melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok sesuai regulasi yang berlaku

Melaksanakan intervensi-intervensi yang mendukung GERMAS yang didasarkan pada kebijakan daerah

Melaporkan pelaksanaan GERMAS kepada Gubernur





Peregangan

Gangguan kesehatan yang sering dialami pekerja adalah masalah gangguan otot rangka (musculoskeletal) terutama di bagian leher, bahu, pergelangan, tulang belakang dan siku. Penyebab utama masalah musculoskeletal adalah posisi duduk yang tidak ergonomis, leher terlalu menunduk, punggung terlalu bungkuk/tegak, dll.

Bekerja pada posisi yang sama dalam waktu lama akan mengakibatkan otot menjadi cepat lelah dan aliran oksigen ke otak berkurang sehingga menurunkan produktivitas kerja. Untuk mengurangi masalah tersebut diperlukan peregangan di tempat kerja.

Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila F. Moeloek, SPM(K), memperkenalkan Senam Peregangan Indonesia pada kesempatan Sidang Regional Committee WHO-SEAR ke-70 di Male, Maladewa, tanggal 6-10 September 2017. Menteri Kesehatan RI dalam pengantarnya menjelaskan bahwa Kementerian Kesehatan RI telah meluncurkan Senam Peregangan Indonesia yang dilakukan dua kali sehari pada setiap pukul 10.00 dan 14.00 dalam rangka mendukung upaya promosi budaya hidup sehat.





Singapura akan mencontoh praktik yang bagus ini. Gerakannya sederhana jadi akan mudah diingat, namun dampaknya besar dalam membangun gaya hidup sehat.

Menteri Kesehatan Singapura,
Mr. Gan Kim Yong pada Pertemuan Menteri Kesehatan
ASEAN di Bandar Seri Begawan, 6 September 2017





Tes IVA

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI lakukan tes kanker serviks melalui Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA), untuk seluruh pegawai/tenaga honorer/outourcing di Kemenkes. Ditargetkan sebanyak 40 pemeriksaan per harinya selama bulan Oktober 2017.

Pemeriksaan dimulai pada Senin (2/10) sampai Selasa (31/10) dan dilakukan per unit kerja. Kegiatan ini atas imbauan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Mufidah Jusuf Kalla melalui Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE KK) dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) dalam rangka bulan Peduli Kanker Payudara Internasional yang diperingati setiap bulan Oktober. Imbuan tersebut ditujukan kepada DWP seluruh kementerian, Dharma Pertiwi, Bhayangkari, dan Adyaksa Dharmakarini.

Dalam pelaksanaannya DWP Kemenkes berkoordinasi dengan Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (Ditjen P2P), Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (Ditjen Kesmas), Pusat Data dan Informasi, Biro Umum, dan Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat (Setjen).



Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)

Pendekatan keluarga adalah salah satu cara puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan/meningkatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga. PIS-PK akan memperkuat upaya promotif dan preventif pada pelayanan kesehatan primer.

Puskesmas yang telah melaksanakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)

Tahun 2017

2.926


Puskesmas

514

Kabupaten

34

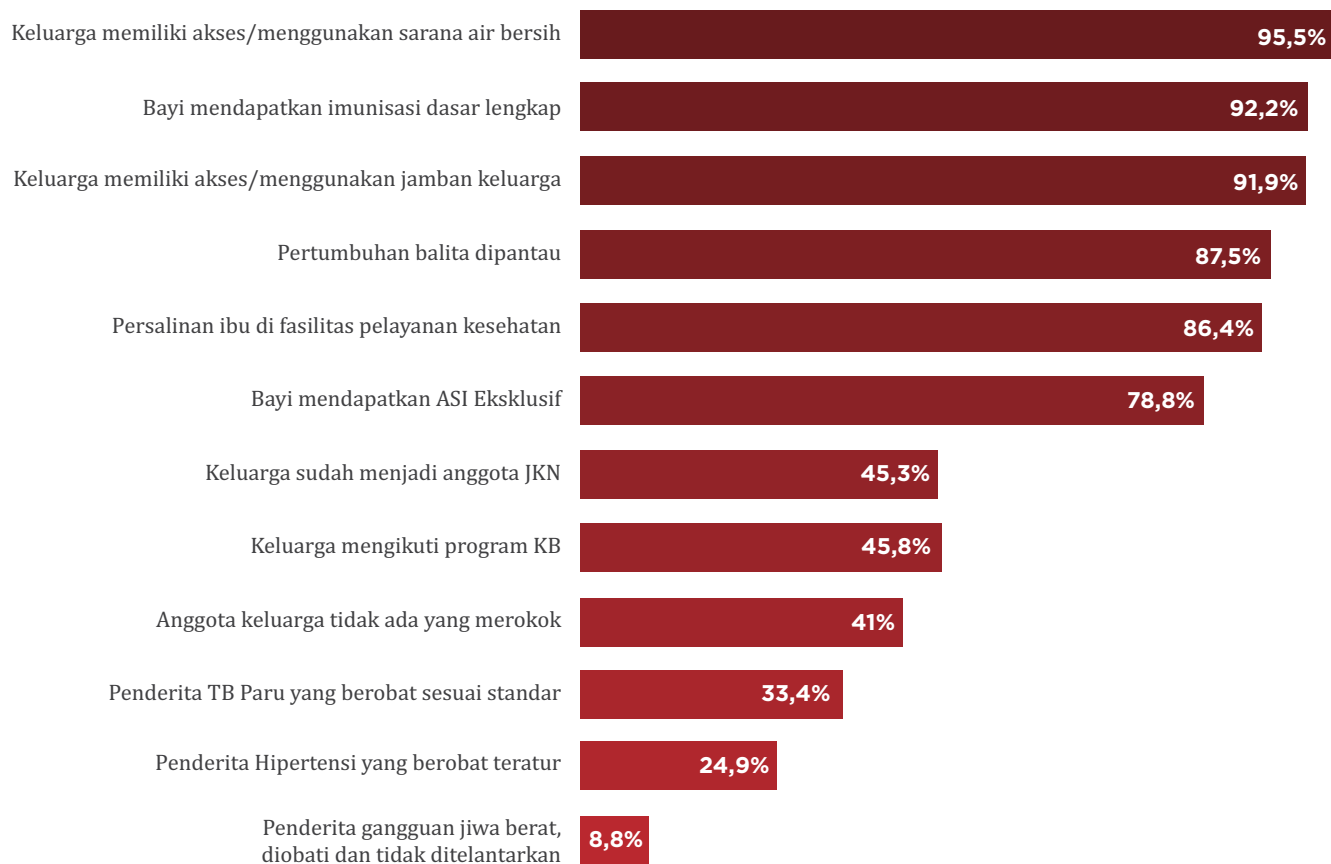
Provinsi



Jumlah
keluarga yang terdata
di aplikasi Keluarga
sehat sebanyak
4.840.623
keluarga yang
tersebar di
34 provinsi.

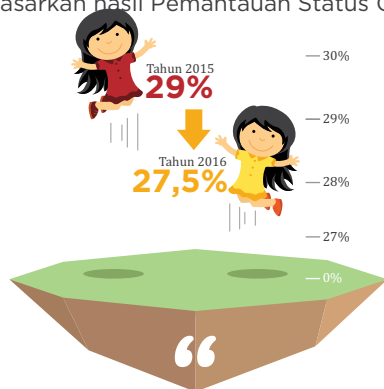
Foto: Muji Mujiono

Cakupan Indikator Keluarga Sehat di Indonesia



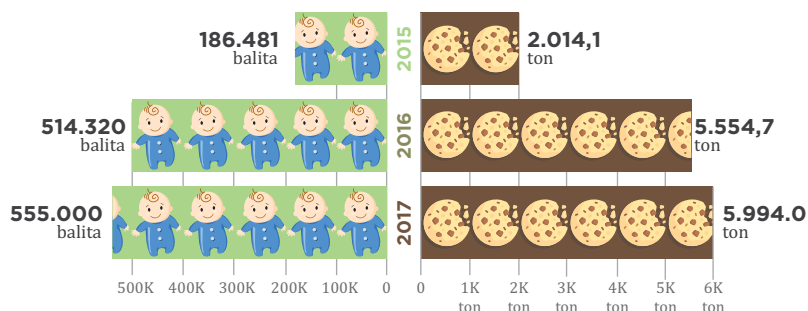
Penurunan Balita Stunting

Berdasarkan hasil Pemantauan Status Gizi (PSG)



Namun berdasarkan angka rekomendasi WHO, angka Balita stunting harus di bawah 20%. Untuk itu, Kemenkes RI terus mendorong upaya pemenuhan gizi, salah satunya dengan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT bagi Ibu Hamil dan Balita)

Capaian PMT Balita Kurus



Capaian PMT Ibu Hamil

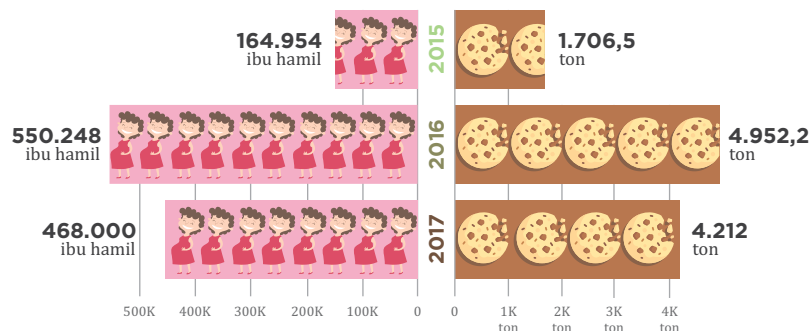


Foto: Haritsah Almodatsir



Kesehatan Ibu dan Anak



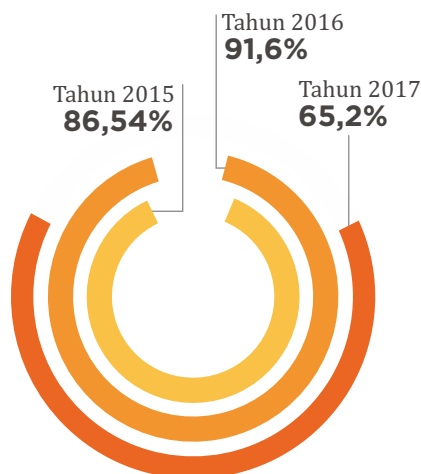
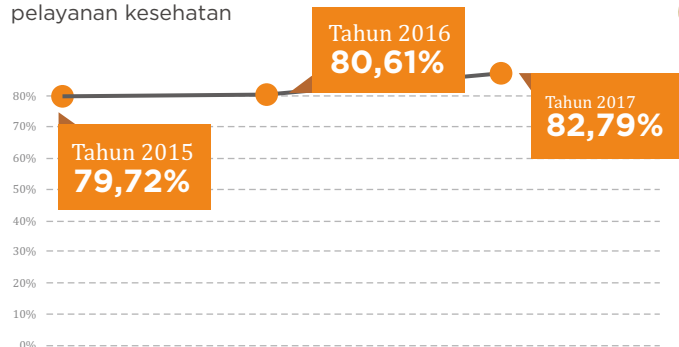
Foto: Arie Basuki

Capaian Layanan Kesehatan

Dalam rangka mewujudkan Keluarga Indonesia Sehat beberapa hasil capaian Program Kesehatan Masyarakat dapat dilihat dari hasil berikut

Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Peningkatan cakupan ibu bersalin yang ditolong tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan

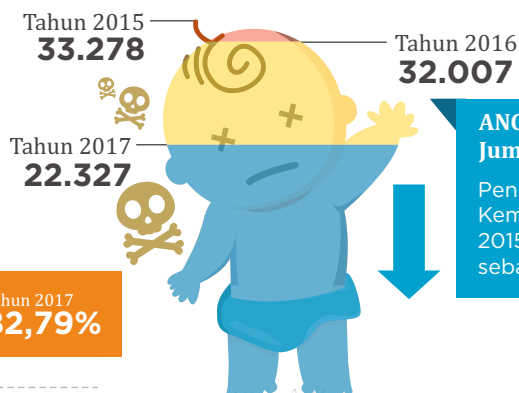


Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)

Selain itu, untuk meningkatkan kekebalan bayi, Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) untuk Bayi juga terus ditingkatkan

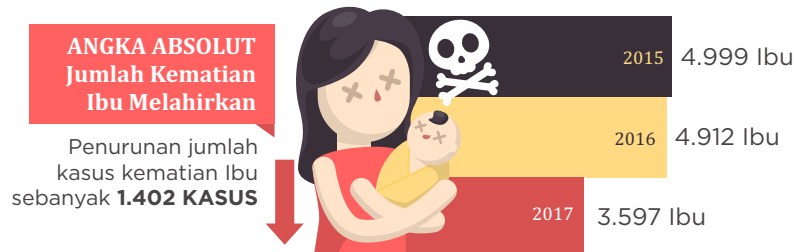
Untuk meningkatkan Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL), Kemenkes melakukan berbagai Upaya Terobosan melalui :

- Peningkatan akses pelayanan imunisasi dengan Sustainable Outreach Services (SOS)
- Drop Out Follow-Up (DOFU)
- Sweeping imunisasi dengan berintegrasi dengan Program Keluarga Sehat



ANGKA ABSOLUT Jumlah Kematian Bayi

Penurunan jumlah kasus Kematian Bayi dari Tahun 2015 ke Tahun 2017 sebanyak **10.951 kasus**



ANGKA ABSOLUT Jumlah Kematian Ibu Melahirkan

Penurunan jumlah kasus kematian Ibu sebanyak **1.402 KASUS**

Sebagai upaya untuk semakin mendekatkan akses masyarakat ke fasilitas pelayanan kesehatan dibentuklah Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)

RTK





KEMENKES RI

ASI
MRI

K IN DONES

2017

“Fatwa MUI menyebutkan:
Imunisasi manfaatnya
lebih banyak
daripada mudaratnya.”

Joko Widodo
Presiden RI
Pencanangan Imunisasi MR
Yogyakarta, 1 Agustus 2017

Imunisasi

Cakupan Imunisasi Measles Rubella

Melalui pemberian imunisasi MR ini, masalah penyakit campak dan rubella akan berangsur menghilang dan cacat bawaan pada bayi akibat rubella juga akan semakin sirna. Imunisasi ini penting dilakukan karena sampai saat ini belum ada obat untuk penyakit rubella

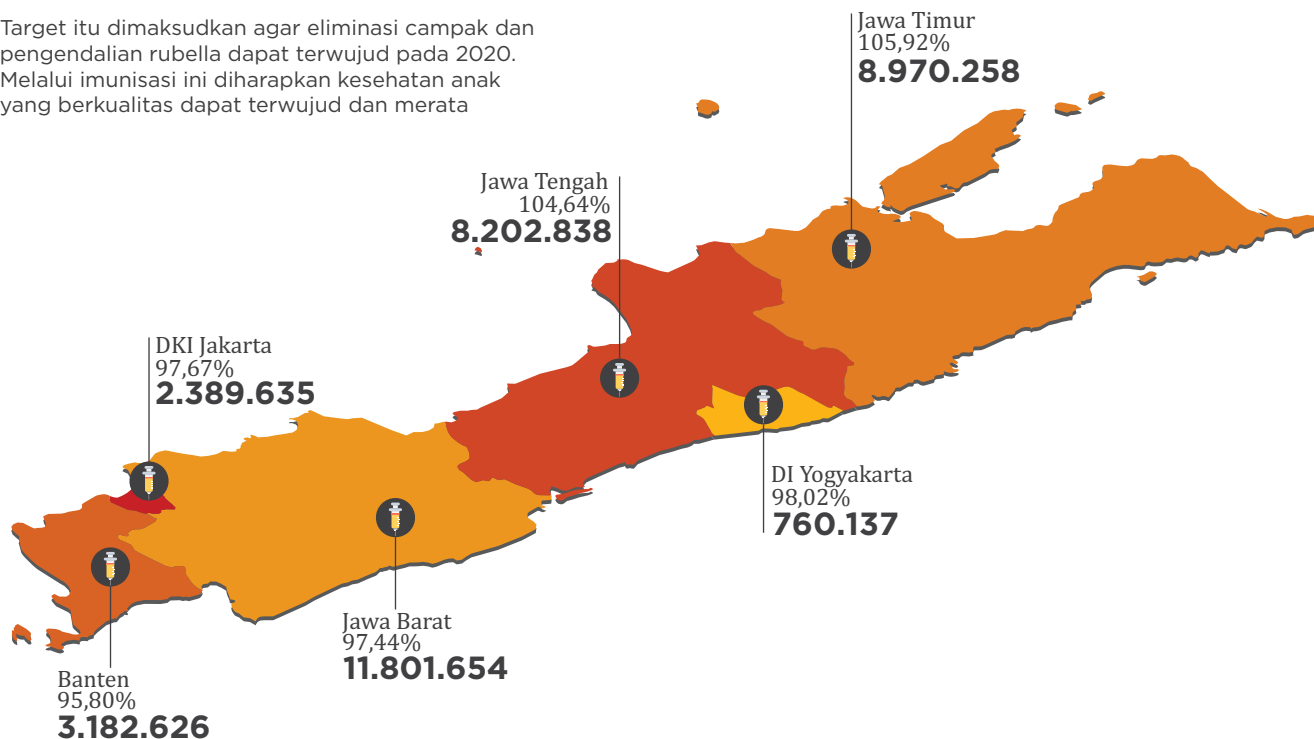
Cakupan imunisasi MR tahap kedua akan dilaksanakan di seluruh provinsi di luar Pulau Jawa, yakni Agustus hingga September 2018. Diharapkan dari cakupan imunisasi MR tahap kedua ini dapat mencapai target bahkan lebih dari target yang sekarang

Target itu dimaksudkan agar eliminasi campak dan pengendalian rubella dapat terwujud pada 2020. Melalui imunisasi ini diharapkan kesehatan anak yang berkualitas dapat terwujud dan merata

Sejumlah

35.307.148
100,98%

Anak Indonesia di Pulau Jawa telah menerima Imunisasi MR TAHAP PERTAMA





Eliminasi Penyakit Tular Vektor

ELIMINASI MALARIA

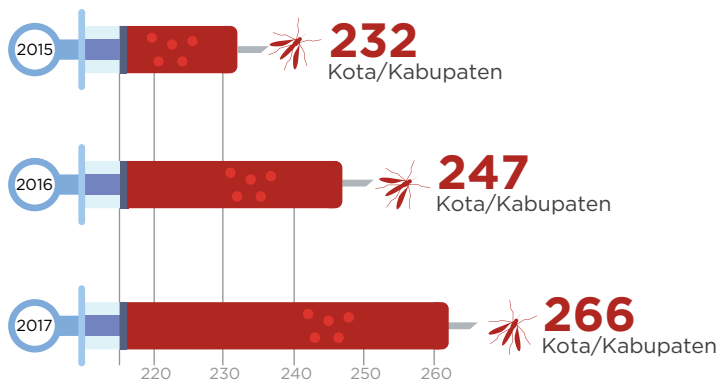
TAHUN 2016: Kementerian Kesehatan telah berhasil menghentikan penularan malaria di 247 kab/kota yang didiami 193 juta penduduk. Selama tahun 2016 telah dilakukan pemeriksaan kasus Suspek malarian dengan mikroskopis atau RDT sebanyak 1.457.858 Kasus dan telah dilakukan pengobatan dengan ACT sebanyak 201.000 kasus.

TAHUN 2017: Sampai dengan bulan Oktober 2017, jumlah kab/kota yang telah bebas dari penularan malaria adalah 266 kab/kota.

Dimana dari 565.493 suspek, 92% (523.313 suspek) diperiksa dengan menggunakan RDT dan mikroskopis.

Sementara dari 84.824 kasus positif, 95% (80.237) kasus diobati dengan ACT.

UPAYA TEROBOSAN : Pemberian kelambu di daerah endemis tinggi malaria, jumlah kelambu yang dibagikan tahun 2017 sebanyak 3,983,000 kelambu.



Jumlah pemberian kelambu di daerah endemis tinggi malaria pada tahun 2017

3.983.000 kelambu

ELIMINASI FILARIASIS

Eliminasi Filariasis adalah sebuah kondisi (keadaan) di mana penularan Filariasis di masyarakat sudah sedemikian rendahnya, sehingga penyakit kaki gajah sudah tidak lagi menjadi masalah kesehatan masyarakat.

TAHUN 2016: di 22 Kab/Kota dari target 12 Kab/Kota, yang dapat membebaskan 15.160.154 penduduk dari Kecacatan akibat Filariasis.

TAHUN 2017: hingga Agustus 2017 di 23 Kab/Kota dari target 15 Kab/Kota yang dapat membebaskan 15.482.681 penduduk dari Kecacatan akibat Filariasis

INOVASI DAN TEROBOSAN

Bulan Eliminasi Kaki Gajah (BELKAGA), merupakan bulan dimana setiap penduduk kabupaten/kota endemis kaki gajah secara serentak minum obat pencegahan. BELKAGA dilaksanakan setiap Oktober sampai tahun 2019.

Pemberian Obat Pencegahan Massal/POPM Filariasis diintegrasikan dengan Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga (PIS-PK)



Tahun
2015

Dilaksanakan di
15 Kabupaten / Kota
6.822.796

Penduduk bebas dari kecacatan akibat filariasis

Tahun
2016

Dilaksanakan di
22 Kabupaten / Kota
15.160.154

Penduduk bebas dari kecacatan akibat filariasis

Tahun
2017

Dilaksanakan di
28 Kabupaten / Kota
17.250.402

Penduduk bebas dari kecacatan akibat filariasis

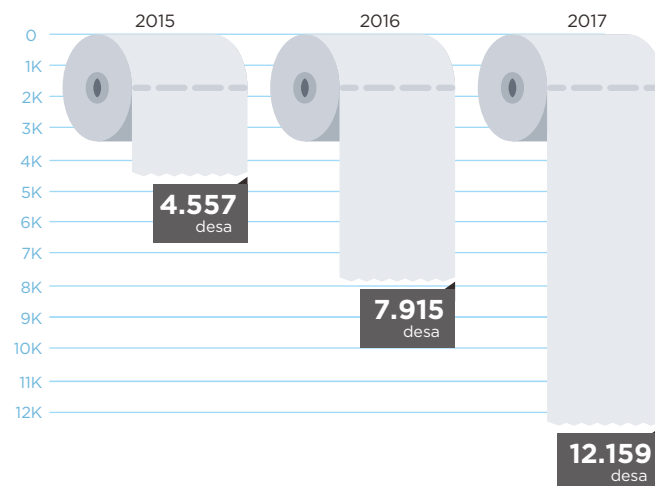
Sanitasi Lingkungan



Foto: Djuli Pamungkas

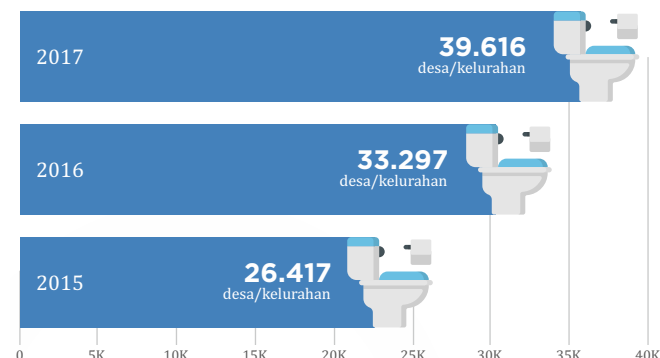
Cakupan Desa Stop Buang Air Besar (BAB) Sembarangan

Perubahan perilaku BAB masyarakat yang semula sembarangan menjadi ke jamban yang memenuhi syarat kesehatan adalah syarat utama. Hingga tahun 2017 telah dilakukan pembinaan untuk stop buang air besar sembarangan di 9.212 desa.



Capaian Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Capaian desa/kelurahan yang terpicu untuk menerapkan STBM dengan memberdayakan masyarakat hingga tahun 2017 sebanyak 35.845 desa/kelurahan.



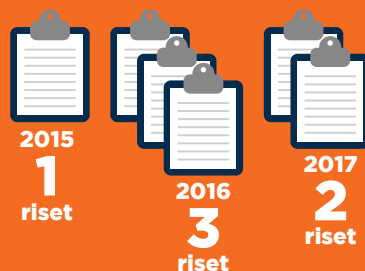
Badan Litbang Kesehatan



Riset Etnografi Kesehatan bisa dipakai sebagai pintu masuk untuk mengubah perilaku masyarakat, khususnya terkait dengan kesehatan.

Kepala Balitbangkes
dr. Siswanto, MHP, DTM

Hasil Riset Kesehatan Nasional (Riskesnas) Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat



Hasil penelitian yang didaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) selalu memenuhi target 100%

2015: **14** karya
2016: **8** karya
2017: **5** karya

Rekomendasi kebijakan berbasis litbang kesehatan yang diadvokasikan ke pemangku kepentingan

24
rekomendasi per tahunnya (100%)



Balitbangkes menghasilkan 87 riset etnografi. Sebanyak 72 di antaranya dipublikasikan dalam bentuk buku

(gabungan antara Riset Etnografi Kesehatan (REK) dan hasil Riset Intervensi Kesehatan (RIK) Berbasis Budaya)

Gerakan Nasional Bude Jamu



Gernas Bude Jamu merupakan salah satu bagian dari program Indonesia Sehat dengan mengutamakan promotif dan preventif.

Sebagai implementasi dari gerakan ini, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian sampai 2017 telah melakukan pembinaan kepada 5.374 pelaku usaha jamu gendong (UJG) dan usaha jamu racikan (UJR) di 62 Kabupaten dan Kota di Indonesia.



Hasil Riset Kesehatan Dasar 2010 menyatakan bahwa 50% masyarakat Indonesia di atas 15 tahun pernah minum jamu dan 96% merasakan manfaatnya. Kementerian Kesehatan meluncurkan Gerakan Nasional Bugar dengan Jamu (Gernas Bude Jamu) yang merupakan suatu gerakan untuk melestarikan budaya minum jamu di masyarakat Indonesia dan menjadikan jamu sebagai pilihan keluarga Indonesia dalam menjaga kesehatan dan kebugaran keluarga.



GeMa CerMat

Kementerian Kesehatan telah meluncurkan program untuk mendorong masyarakat menggunakan obat secara tepat dan benar melalui Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (GeMa CerMat). Program yang terus dijalankan hingga kini diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang lebih cerdas dan berubah perilakunya dalam memilih, mendapatkan, menggunakan, menyimpan dan membuang obat dengan benar.

Sejak dimulai pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, kegiatan GeMa CerMat telah disosialisasikan kepada 19.454 orang masyarakat di 101 Kabupaten/Kota dan juga membina 2.177 orang apoteker sebagai *agent of change*. Dengan adanya GeMa CerMat, masyarakat diharapkan dapat lebih cerdas dan berubah perilakunya dalam memilih, mendapatkan, menggunakan, menyimpan dan membuang obat dengan benar. Serta dapat menggunakan antibiotik secara bijak sesuai petunjuk tenaga kesehatan.



Penguatan Layanan Kesehatan



Pembangunan 124 Puskesmas di Daerah Perbatasan

MEMBANGUN DARI PERBATASAN

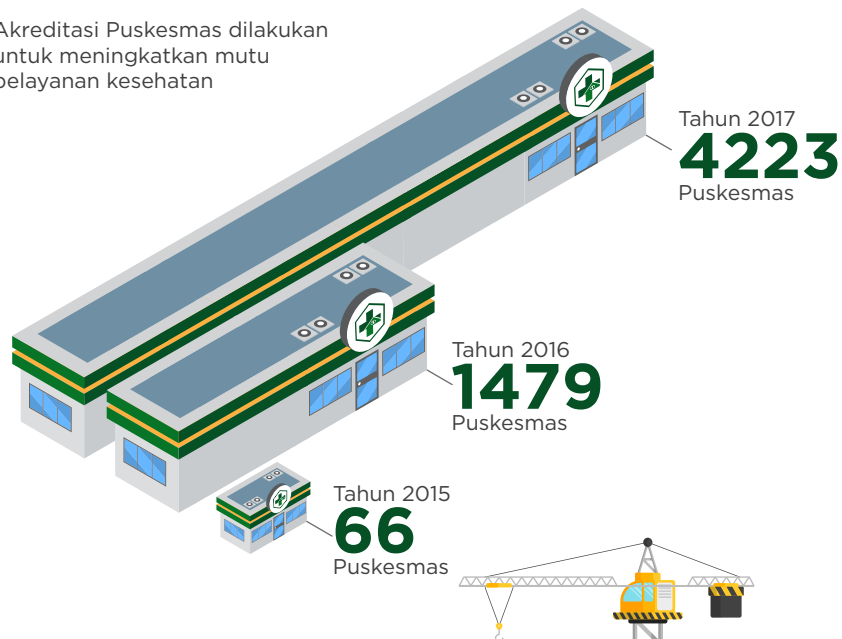
Optimalisasi pelayanan kesehatan di perbatasan dilakukan melalui pembangunan 124 Puskesmas menggunakan Dana Alokasi Khusus afirmasi tahun 2017. Surat Keputusan Menkes No. HK.02.02/Menkes/367/2015 menetapkan 48 Kabupaten/Kota dan 124 Puskesmas Sasaran Program Prioritas Nasional Pelayanan Kesehatan di Daerah Perbatasan tahun 2015-2019.



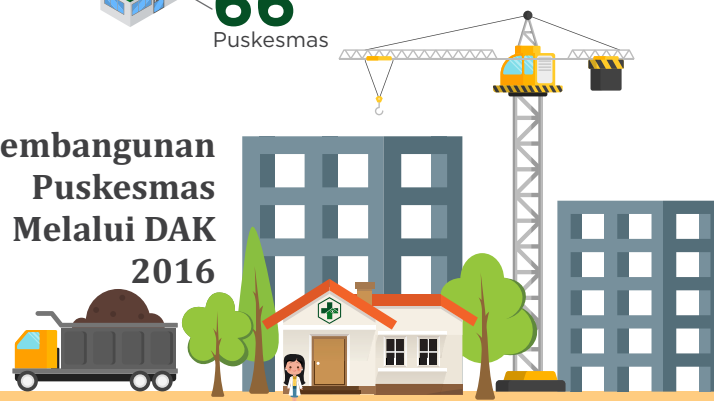


Puskesmas Terakreditasi

Akreditasi Puskesmas dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan



Pembangunan Puskesmas Melalui DAK 2016



3802
Puskesmas Keliling Roda 4

704
Ambulance

154
Puskesmas Keliling Air

3607
Puskesmas Keliling Roda 2



1200
Pembangunan Gedung atau Peningkatan



2272
Rehap Puskesmas



224
Pembangunan Baru

124 PUSKESMAS di 48 KABUPATEN / KOTA DAN SASARAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PELAYANAN KESEHATAN DI DAERAH PERBATASAN

ACEH

Simeulue: Pusk. Simeulue Cut

Kota Sabang: Pusk. Iboih

SUMATERA UTARA

Nias Selatan: Pusk. Pulau Tello

Serdang Bedagai: Pusk. Tanjung Beringin

RIAU

Indragiri Hilir: Pusk. Sungai Guntung

Bengkalis: Pusk. Tanjung Medang, Pusk.
Selat Baru

Rokan Hilir: Pusk. Sinaboi

Kep. Meranti: Pusk. Tanjung Samak

Kota Dumai: Pusk. Dumai Kota

BENGKULU

Bengkulu Utara: Pusk. Enggano

KEP. RIAU

Karimun: Pusk. Tebing

Bintan: Pusk. Tambelan

Natuna: Pusk. P. Laut, Pusk. Serasan Timur,
Pusk. Subi

Kep. Anambas: Pusk. Jemaja Timur

Kota Batam: Pusk. Belakang Padang

NUSA TENGGARA TIMUR

Kupang: Pusk. Naikliu, Pusk. Oepoli
Timor Tengah Utara: Pusk. Eban, Pusk. Oeolo,
Pusk. Tasinifu, Pusk. Napan, Pusk. Manamas,
Pusk. Wini

Belu: Pusk. Webora, Pusk. Haliwen, Pusk.
Weluli, Pusk. Wedomu, Pusk. Silawan, Pusk.
Haekesak, Pusk. Laktutus, Pusk. Nualain

Malaka: Pusk. Namfalus, Pusk. Besikama,
Pusk. Alas

Alor: Pusk. Buraga, Pusk. Kalunan, Pusk.
Padang Alang, Pusk. Maritaing

Kab. Rote Ndao: Pusk. Batutua, Pusk. Ndao

Sabu Raijua: Pusk. Ledeunu

KALIMANTAN BARAT

Sambas: Pusk. Sajingan Besar, Pusk. Paloh,
Pusk. Temanjuk

Bengkayang: Pusk. Jagoi Babang, Pusk.
Siding,

Sanggau: Pusk. Balai Karangan, Pusk.
Entikong

Sintang: Pusk. Merakai, Pusk. Senaning

Kapuas Hulu: Pusk. Nanga Kantuk, Pusk.
Puring Kencana, Pusk. Badau, Pusk. Lanjak,
Pusk. Benua Martinus

KALIMANTAN TIMUR

Mahakam Ulu: Pusk. Long Pahangai, Pusk.
Tiong Ohang

Berau: Pusk. Maratua

KALIMANTAN UTARA

Malinau: Pusk. Long Nawang, Pusk. Long
Ampung, Pusk. Data Dian, Pusk. Long
Pujungan, Pusk. Long Alango, Pusk.
Nunukan, Pusk. Long Bawan, Pusk. Long
Layu, Pusk. Binter, Pusk. Sei Menggaris, Pusk.
Sanur, Pusk. Sungai Nyamuk, Pusk. Setabu,
Pusk. Aji Kuning

SULAWESI UTARA

Sangihe : Pusk. Marore, Pusk. Kendahe

Kep. Talaud : Pusk. Dapalan, Pusk. Karatung,
Gemeh, Pusk. Miangas

Minahasa Utara : Pusk. Tinongkok

Siau Taguladang Biaro : Pusk. Ondong, Pusk.
Makalehi

SULAWESI TENGAH

Toli-Toli : Pusk. Ogotua

MALUKU

Maluku Tenggara Barat : Pusk. Saumlaki,
Pusk. Linggat, Pusk. Namtabung, Pusk. Larat,
Kep. Aru : Pusk. Koijabi, Pusk. Longgar Apra
Maluku Barat Daya : Pusk. Ustutun, Pusk.
Ilwaki, Pusk. Wonreli, Pusk. Serwaru, Pusk.
Lelang, Pusk. Marsela

MALUKU UTARA

Morotal : Pusk. Bere-Bere, Pusk. Sopi, Pusk.
Wayabula

PAPUA BARAT

Raja Ampat : Pusk. Dorekar

PAPUA

Merauke : Pusk. Kimaam, Pusk. ota, Pusk.
Naukenjerai, Pusk. Bupul, Pusk. Ulilin

Boven Digoel : Pusk. Kombut, Pusk. Ninati

Peg. Bintang : Pusk. Iwur, Pusk. Pepera, Pusk.
Okwyop, Pusk. Warasamol, Pusk. Tarup, Pusk.
Mopinop, Pusk. Batom, Pusk. Murkim

Sarmi : Pusk. Sarmi

Keerom : Pusk. Ubrub, Pusk. Milki, Pusk.
Senggi, Pusk. Waris

Supiori : Pusk. Sabarmiokre, Pusk.
Sorendiwieri

Kota Jayapura : Pusk. Koya Barat, Pusk.
Skow Mabo

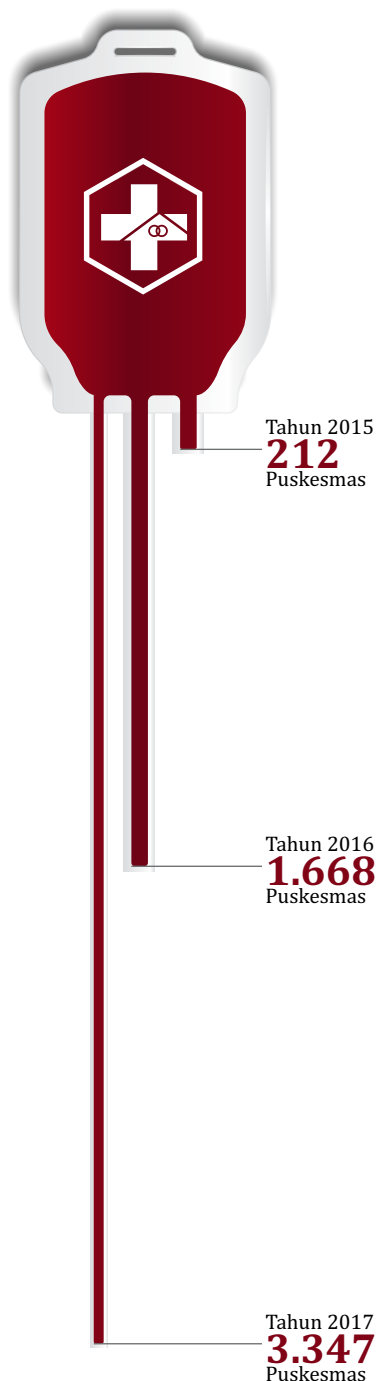
Puskesmas Wahana DLP

Dokter Layanan Primer (DLP) sebagai *gatekeeper* di fasilitas pelayanan kesehatan, merupakan SDM yang memegang peranan penting dalam upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat di fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Peran dan tanggung jawab Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat penting dalam membina wahana pendidikan DLP yang sudah ditetapkan, yang berkedudukan di wilayah kerjanya.

Tahun 2017 terdapat
262 Puskesmas
yang memenuhi syarat
menjadi wahana
pendidikan Dokter
Layanan Primer (DLP)

Kerjasama Puskesmas, RS dan UTD



Program Kerja Sama

Rumah Sakit, Puskesmas, dan
Unit Transfusi Darah

Salah satu Program Nawacita di bidang kesehatan adalah memperjuangkan Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI).

Saat ini AKI di Indonesia masih tinggi, berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Tahun 2015, AKI di Indonesia sebesar **305 per 100.000 kelahiran hidup**.

Kematian Ibu di Indonesia tetap didominasi oleh tiga penyebab utama kematian yaitu **pendarahan, hipertensi dalam kehamilan (hdk), dan infeksi**.

Sebagai salah satu upaya untuk menurunkan angka kematian ibu melahirkan adalah melalui pemenuhan kebutuhan darah bagi ibu melahirkan dengan komplikasi pendarahan.

Hal ini membutuhkan pelayanan darah yang aman dan berkualitas, serta perlu didukung dengan ketersediaan darah sesuai kebutuhan.

Untuk mencapai Nawacita tersebut, ditetapkan Quick Win bidang kesehatan terkait dengan pelayanan darah, yaitu program kerja sama antara Puskesmas, Unit Transfusi Darah (UTD), dan Rumah Sakit dalam pelayanan darah untuk menurunkan angka kematian ibu

Inovasi Rumah Sakit



199 Cath Lab

di

171 RS

sudah mampu melakukan

**Operasi
Katerisasi
Jantung**

10 RS

yang sudah melaksanakan

**Transplantasi
Ginjal**

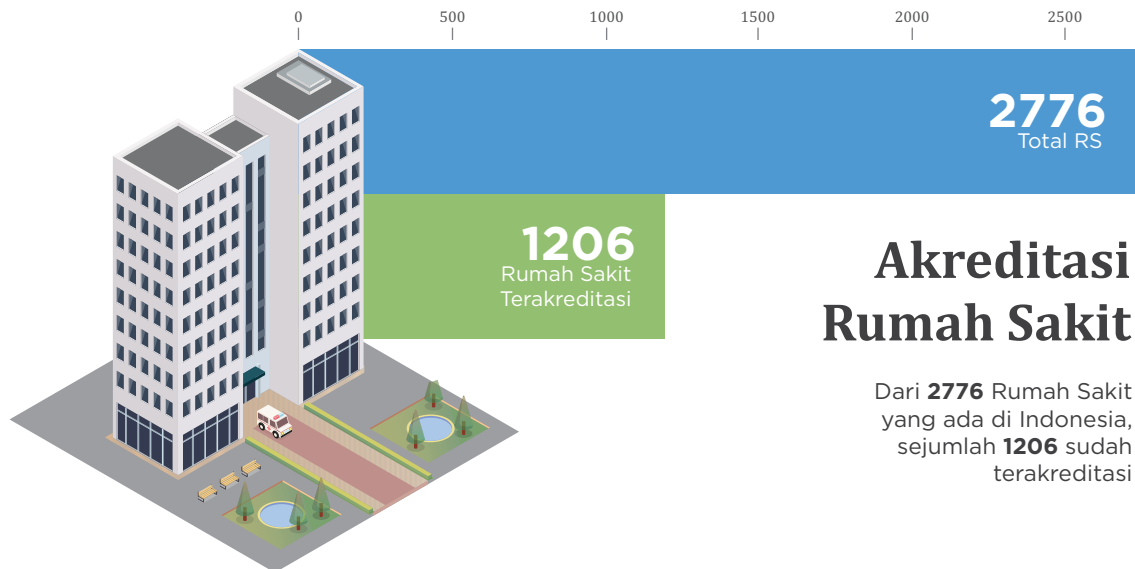
RSUPN Cipto Mangunkusumo, RSUP
Cikini, RSPAD dr. Gatot Subroto,
RSUP Hasan Sadikin, RSUP Kariadi,
RSUP Sardjito, RSUD dr. Soetomo,
RSUD dr. Moewardi Solo,
RSUP dr. M. Djamil Padang,
RSUP Sanglah Denpasar.

5 RS

sudah melaksanakan

**Transplantasi
Hati**

RSUPN Cipto Mangunkusumo,
RSUP Adam Malik, RSUP Kariadi,
RSUP Sardjito,
RSUD dr. Soetomo



Akreditasi Rumah Sakit

Dari **2776** Rumah Sakit yang ada di Indonesia, sejumlah **1206** sudah terakreditasi



Pembangunan Rumah Sakit Melalui DAK 2016

Melalui Dana Alokasi Khusus bidang Kesehatan dilakukan pembangunan sarana dan prasarana dari tingkat dasar hingga rujukan serta upaya penyediaan obat di seluruh wilayah Indonesia

Rumah Sakit Pengampu Stem Cell

RSUPN Dr. Cipto
Mangunkusumo
Jakarta

RSUD Dr. Soetomo
Surabaya

9 RS yang diampu

- RSUP dr. M. Djamil Padang
- RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta
- RSUP dr. Hasan Sadikin Bandung
- RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta
- RSUP Fatmawati Jakarta
- RS Khusus Kanker Dharmais Jakarta
- RSUP dr. Kariadi Semarang
- RSUP Sanglah Denpasar
- RSUP Persahabatan Jakarta

Rumah sakit
sebagai pusat
pengembangan
pelayanan
medis, penelitian
dan pendidikan
bank jaringan
dan sel punca



NCC 119

Public Safety Center (PSC) adalah suatu mekanisme pelayanan korban/pasien gawat darurat yang terintegrasi. Berbasis call center dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119

Sudah
terbentuk PSC
di
134
kab/kota
dari total 514
kab/kota





Alur SPGDT

Sistem Penanganan Kegawat Daruratan Terpadu





KEMENKES RI



Internsip

Proses pematapan mutu profesi dokter dalam program internsip diterjemahkan dalam regulasi Permenkes Nomor 39/Menkes/Per/VIII/2017 Tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi. Para dokter diajak berinteraksi langsung dengan masyarakat di fasilitas pelayanan kesehatan.

Sepanjang
2015 - 2017
sejumlah
28.432
Lulusan dari
75
Fakultas
Kedokteran
mengikuti
Program Internsip
Dokter Indonesia



Foto: Ruli Karepesina

Nusantara Sehat

Nusantara Sehat tujuannya untuk memberikan dan menjaga keberlangsungan serta pemerataan pelayanan kesehatan primer di remote area sekaligus pemenuhan jenis dan jumlah tenaga kesehatan. (PERMENKES 16/2017)

Program ini merupakan penugasan khusus tenaga kerja kesehatan berbasis tim dan individual terutama di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan pada Puskesmas terpencil dan sangat terpencil.

Hal ini untuk mewujudkan nawa cita "membangun Indonesia dari pinggiran"



Penempatan Nusantara Sehat

Team Based Nusantara Sehat yang bertugas di DTPK hingga Desember sebanyak 1064 orang

Tersebar di

439 Puskesmas
269 Kabupaten/kota
29 Provinsi

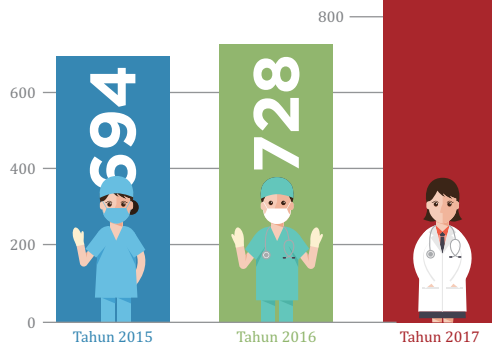
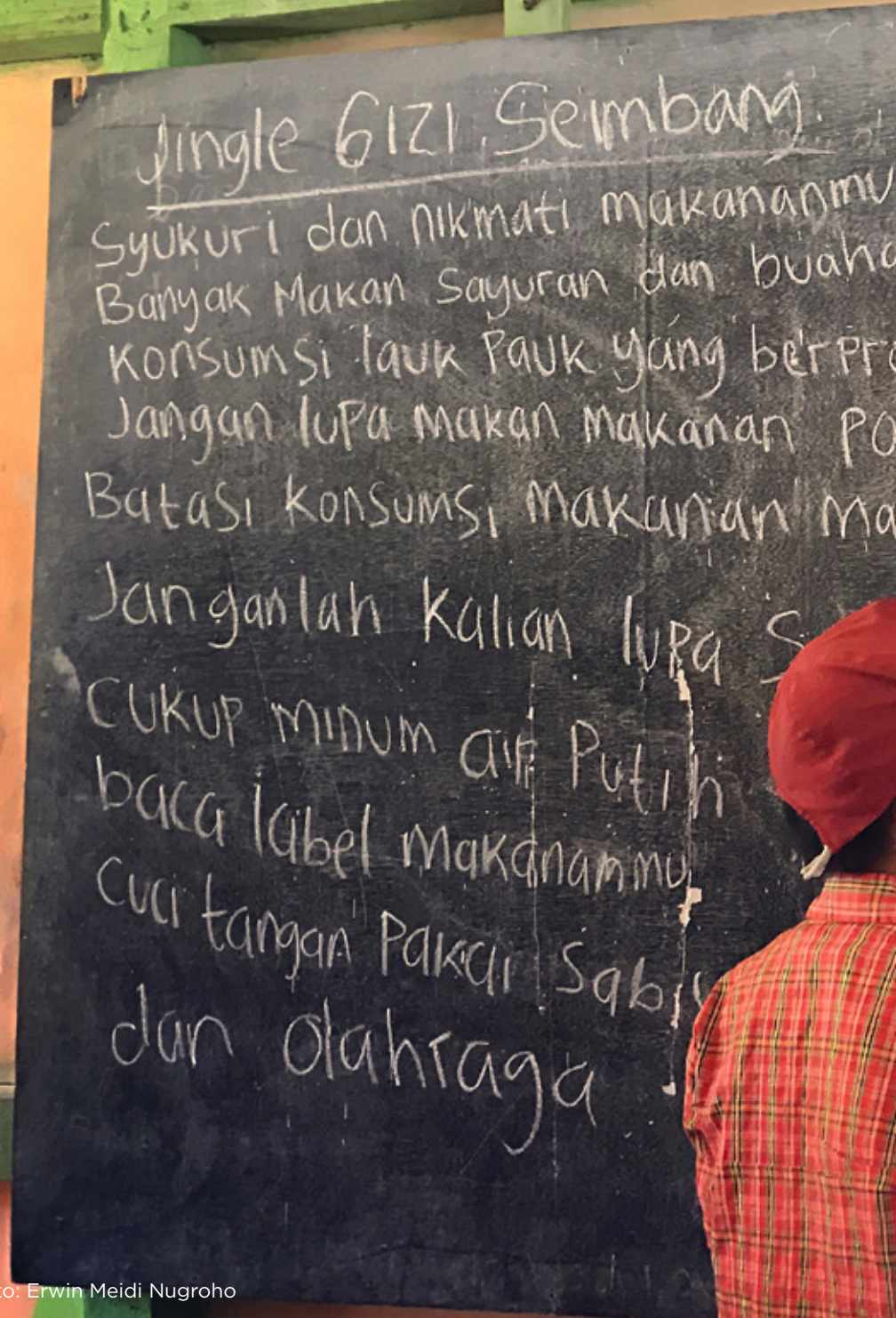


Foto: Erwin Meidi Nugroho







KEMENKES RI



Nusantara Sehat Penugasan Individu

Program Nusantara Sehat Penugasan Individu tidak jauh berbeda dengan Nusantara Sehat berbasis tim. Dilihat dari segi jenis tenaga kesehatan, peserta Program Nusantara Sehat Penugasan Individu juga terdiri dari 9 jenis nakes, yaitu dokter, perawat, bidan, dokter gigi, tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga

kefarmasian dan tenaga kesehatan masyarakat. Masa penugasannya selama dua tahun, dengan evaluasi setelah 1 tahun masa penugasan. Yang membedakan adalah peserta Program Nusantara Sehat Penugasan Individu akan ditempatkan di Puskesmas terutama dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil. Di samping itu, Individu yang berangkat dibawah 5 orang.

Tahun 2017

1.663
Nakes

sudah diberangkatkan ke
612 Puskesmas DTPK di
161 Kab
28 Provinsi





Foto: Sulistiowati

Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS)

Target penugasan WKDS pada tahun 2017 ini sebanyak 1.000 orang. Penugasan ke lokasi penempatan dilakukan secara bertahap sesuai dengan jumlah lulusan dari pendidikan profesi program dokter spesialis.

Hingga September 2017 telah ditempatkan sebanyak empat angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 529 orang, yang terdiri dari 303 orang peserta mandiri dan 226 orang peserta Penerima Beasiswa atau Program Bantuan Biaya Pendidikan. Selanjutnya, pada November 2017 ditempatkan WKDS angkatan V dengan jumlah peserta sebanyak 341 orang, yang terdiri atas 206 orang peserta mandiri dan 135 orang peserta penerima beasiswa biaya pendidikan. Sehingga, total peserta WKDS yang dikirim pada tahun 2017 sebanyak 870 orang.

Visitasi rumah sakit pertama telah dilakukan dari akhir tahun 2016, dan sampai saat ini telah direkomendasikan sebanyak 279 rumah sakit dari 361 rumah sakit yang divisitasi sebagai lokasi penempatan WKDS.



Wajib Kerja Dokter Spesialis

Penempatan dokter spesialis di rumah sakit milik Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai upaya peningkatan akses dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan spesialistik serta pemerataan pelayanan kesehatan
PERPRES NO.4/2017 PASAL 7 AYAT (2,3)

Peserta WKDS

Dokter Spesialis lulusan pendidikan profesi program dokter spesialis dari perguruan tinggi negeri di dalam negeri dan perguruan tinggi di luar negeri, baik dengan jalur mandiri maupun dengan beasiswa



Prioritas

Program dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi, Spesialis Anak, Spesialis Bedah, Spesialis Penyakit Dalam, dan Spesialis Anestesiologi dan terapi Intensif

Penempatan

Dari Januari - Desember 2017

Tenaga WKDS **870**

Rumah Sakit **484**

Kabupaten/kota **370**



Masa Kerja WKDS

Mandiri

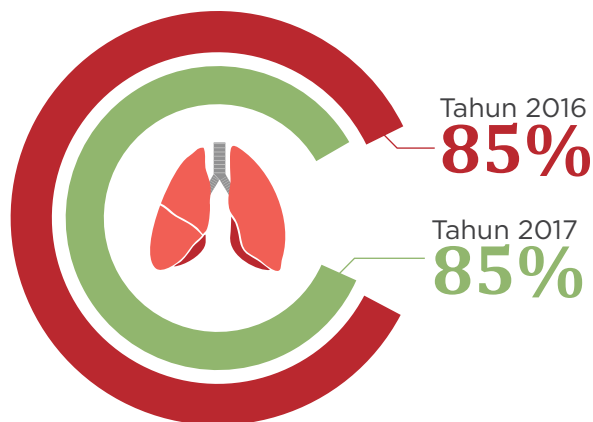
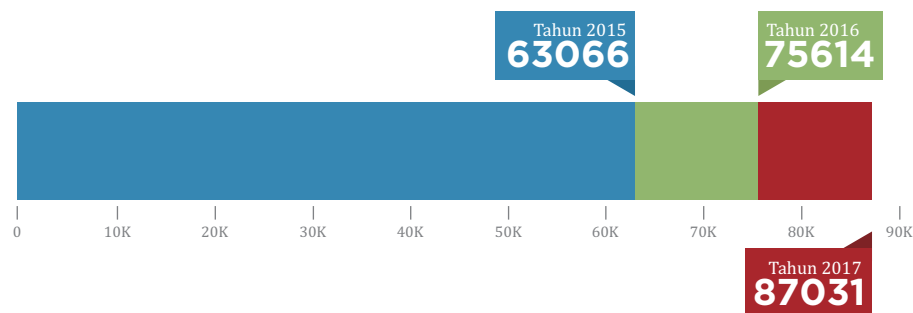
Jangka waktu pelaksanaan WKDS bagi peserta WKDS Mandiri paling singkat selama 1 (satu) tahun

Penerima Beasiswa

Jangka waktu pelaksanaan WKDS bagi peserta WKDS Penerima Beasiswa dan/atau program bantuan biaya pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengendalian Penyakit Menular Langsung





Jumlah ODHA yang mendapatkan Anti Retroviral



Angka Keberhasilan TB (Success Rate/SR) di Indonesia berhasil dipertahankan **minimal 85%** sejak tahun 1999



Penguatan Instalasi Farmasi Pemerintah di Provinsi dan Kabupaten/Kota

tahun	 Obat dan BMHP	 Pembangunan Instalasi Farmasi	 Renovasi Instalasi Farmasi	 Sarana Instalasi Farmasi
2015	Rp. 1.507.937.132.960	16 IF	36 IF	300 paket
2016	Rp. 2.190.608.321.968	53 IF	220 IF	1489 paket
2017	Rp. 1.777.951.891.059	28 IF	90 IF	821 paket

Jaminan Kesehatan Nasional



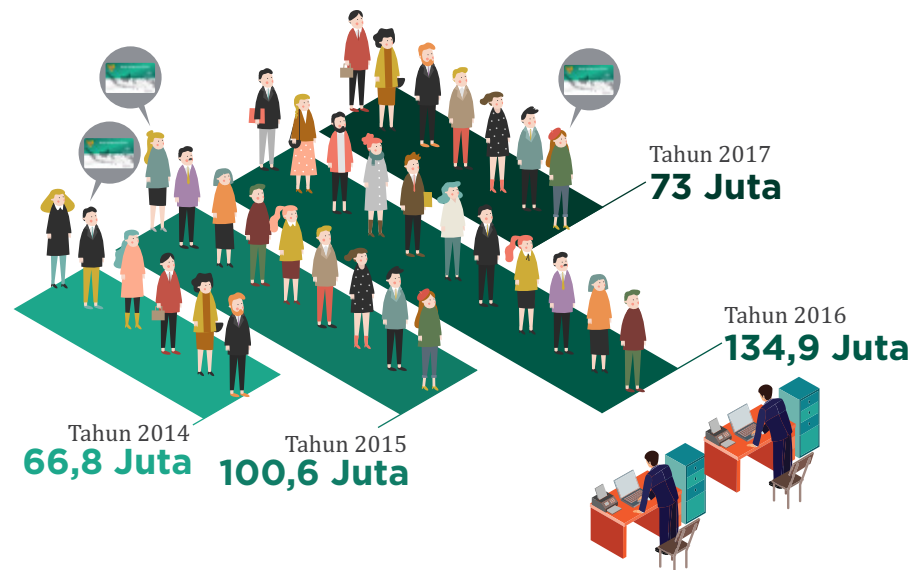


Mewujudkan JKN

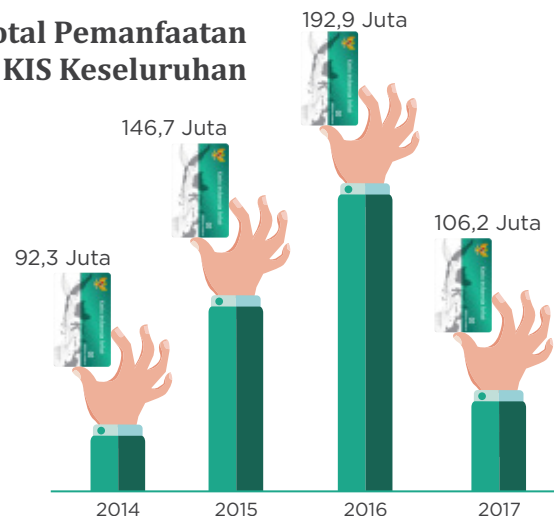
Pemerintah terus meningkatkan jumlah JKN dan fasilitas kesehatan yang melayani serta membayarkan iuran bagi penduduk miskin

Pemanfaatan JKN KIS di FKTP

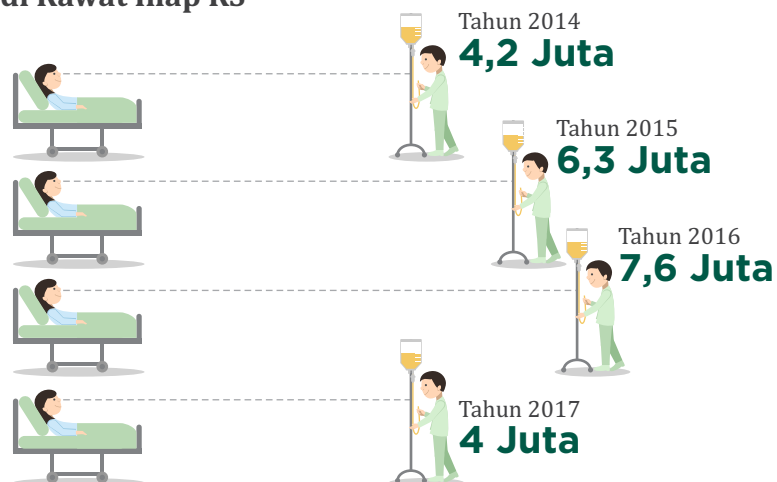
(Puskesmas, Dokter Praktek Perorangan/ Klinik Pratama)



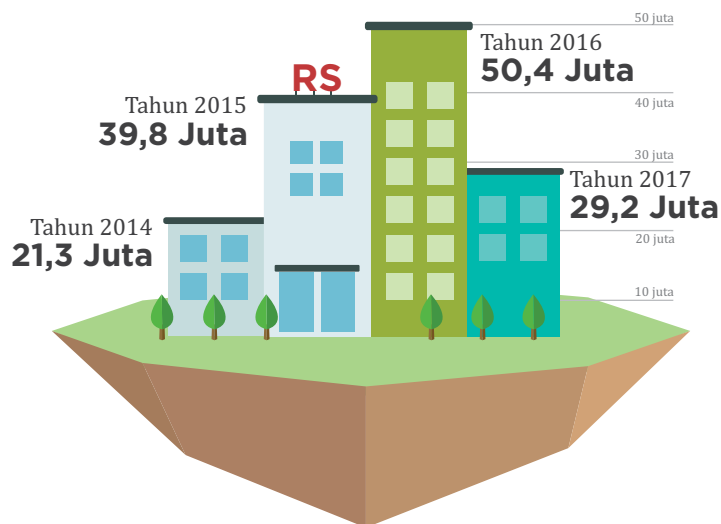
Total Pemanfaatan JKN KIS Keseluruhan



Pemanfaatan JKN KIS di Rawat Inap RS



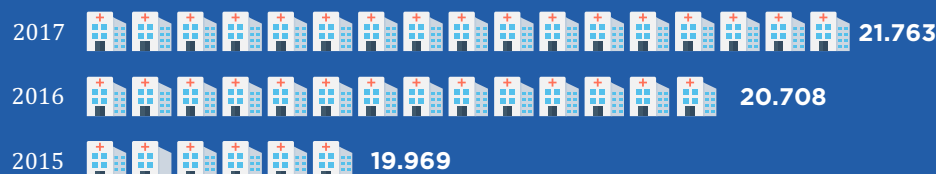
Pemanfaatan JKN KIS di Poliklinik Rawat Jalan RS



Fasilitas Kesehatan yang sudah bekerjasama dalam mewujudkan JKN

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

Data per 4 Desember 2017



21.364 FKTP

	9747	Puskesmas
	4828	Praktik Perorangan
	1124	Dokter Gigi
	4400	Klinik Pratama
	686	Klinik TNI
	563	Klinik Polri
	16	RS Kelas D Pratama



Fasilitas Apotek dan Optikal

Optikal 1.018
Apotik 2.362
Tahun 2017 **3.380**

Tahun 2016 **2.921**

Tahun 2015 **2.813**

Jumlah Peserta JKN PBI (APBN)

92.315.867

Peserta didaftarkan Pemda

20.241.768






Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU)

44.310.066

Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBP & BP)

29.734.870

2.440 FKTL

RS Pemerintah	685	
RS Swasta	1163	
RS TNI / POLRI	141	
RS Khusus	253	
Klinik Utama	198	

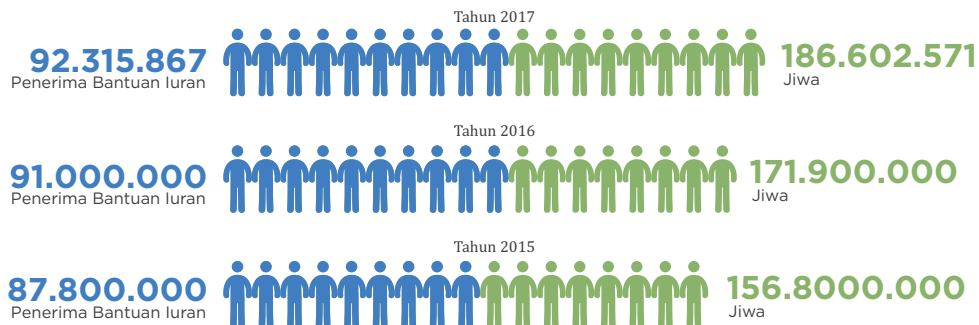




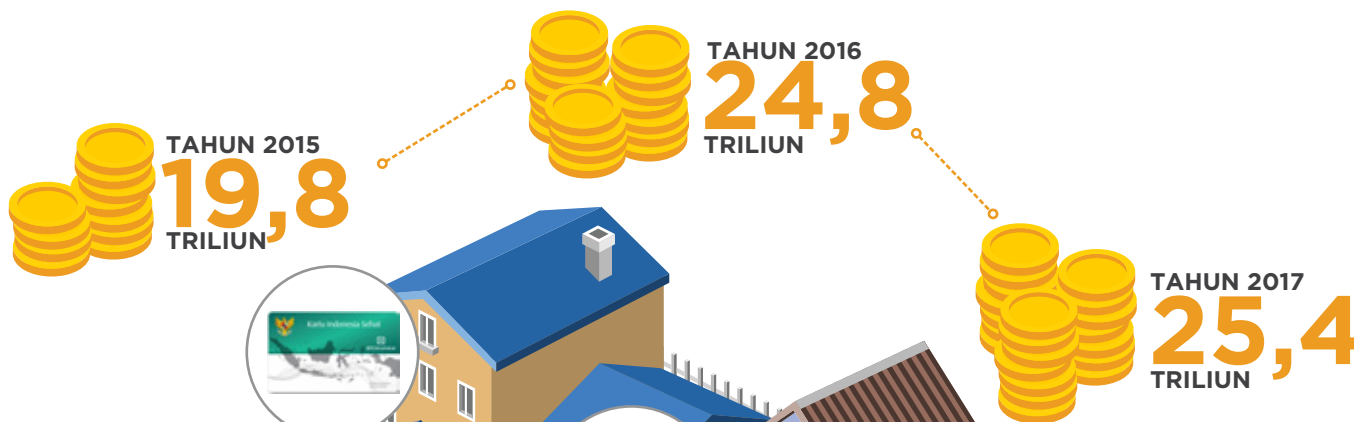
Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah kartu identitas peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

Penggantian kartu BPJS Kesehatan menjadi Kartu Indonesia Sehat dimulai 1 Maret 2015

Penduduk Indonesia Telah Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (per Desember 2017)



Anggaran yang dialokasikan untuk JKN PBI



Jumlah Kebersertaan
187,9 juta
Jiwa







Kaleidoskop



Operasi Bayi Kembar Siam Berhasil Dipisah

Tim dokter Rumah Sakit Anak dan Bunda (RSAB) Harapan Kita berhasil melakukan operasi pemisahan bayi kembar siam Rafky Setia Sumita dan Rifky Setia Sumita. Mereka didiagnosis Craniopagus (dempet kepala) dan menjalani operasi dalam dua tahap.

Operasi tahap pertama dilakukan pada Kamis, 2 Februari 2017 selama 10 jam. Tim dokter spesialis yang dilibatkan diantaranya, 4 dokter spesialis bedah syaraf, 7 dokter anestesi, 6 dokter spesialis bedah plastik, dan 15 perawat.

Operasi tahap kedua dilakukan pada Sabtu, 4 Februari 2017 selama 18 jam. Pada tahap tersebut membutuhkan waktu yang lebih lama karena harus memisahkan tulang bagian depan dan memisahkan kedua kepala serta merekonstruksi kulit kepala bayi.





Kemenkes dan BPJS Kesehatan Tandatangani Peraturan Bersama Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran KBKP Pada FKTP

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes, dan Direktur Utama Badan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Prof. DR. Dr. Fachmi Idris, M.Kes, menandatangani Peraturan Bersama Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan (KBKP) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Kantor Kemenkes RI, Jakarta Selatan, pada 31 Maret 2017.

Kemenkes dan BPJS Kesehatan telah menerbitkan Peraturan Bersama tentang Penerapan Pembayaran KBKP di FKTP. Pembayaran KBKP pada FKTP, telah dilaksanakan sejak tahun 2016 di seluruh Puskesmas di Ibukota Provinsi dan direncanakan akan di laksanakan pada seluruh FKTP di tahun 2017.

KBKP merupakan metode penilaian komitmen pelayanan FKTP dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Penilaian

berdasarkan pada indikator-indikator, yaitu: angka kontak, rasio rujukan rawat jalan non spesialisik, rasio kunjungan prolanis dan rasio kunjungan rumah untuk Puskesmas.

Diharapkan, peraturan bersama antara Kemenkes dan BPJS Kesehatan tersebut mampu mengoptimalkan pelaksanaan KBKP di FKTP dan meningkatkan performa dalam penyelenggaraan implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).



Menkes Lepas 9 Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) di NTT

Pada tanggal 2 Mei 2017, Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M(K) melepas 9 peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) di Provinsi NTT yang terdiri dari 4 dokter spesialis mandiri dan 5 dokter spesialis tugas belajar.

Keempat dokter peserta WKDS mandiri ditempatkan di RSUD Soe, terdiri dari 1 orang dokter spesialis obgyn, 1 orang dokter spesialis anastesi, 1 orang dokter spesialis bedah dan 1 orang dokter spesialis penyakit dalam. Sementara lima peserta WKDS yang lain yang

sudah menyelesaikan tugas belajar dikembalikan kepada instansi asal yaitu di RSUD Atambua 1 orang dokter spesialis bedah, RSUD Lewo Lembatta 1 orang dokter spesialis obgyn, RSUD Ba'a 1 orang dokter spesialis anastesi, RSUD T.C.Hillers Maumere 1 orang spesialis obsgyn dan Dinkes Kabupaten Flores Timur 1 orang spesialis anak.

Guna mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), penguatan dilakukan dari segi fasilitas pelayanan kesehatan mulai dari optimalisasi

rujukan, percepatan akreditasi Rumah Sakit dan Puskesmas, hingga pengembangan layanan inovasi untuk menjangkau daerah terpencil. Sedangkan dari segi SDM kesehatan dilakukan melalui upaya peningkatan kapasitas SDM Kesehatan, sarana dan prasarana penunjang, alokasi beasiswa, bahkan hingga terobosan pengiriman tim Nusantara Sehat dan Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) sebagai upaya pemenuhan tenaga kesehatan di daerah.



Tugas Tim Nusantara Sehat Batch I & II Berakhir

Tim Nusantara Sehat (NS) batch I periode pertama Tahun 2015 yang terdiri dari 142 tenaga kesehatan (Nakes) telah menyelesaikan masa pengabdian selama dua tahun.

Nakes yang terbagi dalam 20 tim NS itu ditempatkan di Puskesmas terpencil dan sangat terpencil di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK). Mereka resmi ditugaskan pada 27 April 2015 dan pada 31 Mei tahun 2017, 20 Tim NS telah menyelesaikan masa pengabdian.

Tim NS angkatan pertama bertemu kembali di Jakarta. Pertemuan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi pasca penugasan dan pemulangan tim NS batch I.

Pertemuan dilakukan selama 3 hari ini diisi dengan materi pendayagunaan pasca penugasan Nusantara Sehat, di antaranya akan dibahas peluang untuk mengikuti penugasan khusus individu, tugas belajar, peluang kerja ke luar negeri dan pendayagunaan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menkes RI, Prof. Dr.dr. Nila Juwita Farid Moeloek, Sp.M(K) mewakili Kementerian Kesehatan, mengucapkan selamat kepada 142 Nakes yang telah menyelesaikan masa pengabdian selama dua tahun

dan kembali dalam jumlah yang sama tanpa ada yang diberhentikan. Hal ini menunjukkan sistem rekrutmen yang cukup baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di samping itu dengan rasa bangga Menkes Prof. Nila Moeloek menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas pengabdian mereka, karena banyak sekali pujian dan penghargaan dari Masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten maupun Dinas Kesehatan Provinsi atas pengabdian mereka selama dua tahun.



Mudik Lebaran

Di bawah Kemenko Maritim, Kementerian Perhubungan melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Antara lain, Kementerian PUPR, Kemenkes, Pertamina, Jasa Marga, dan Polri. Tujuannya adalah untuk memberikan layanan maksimal kepada masyarakat dari semua lini; infrastruktur, komunikasi, sarana transportasi, kesehatan, keamanan dan lain-lain. Kerjasama antar Kementerian dan Lembaga telah terkoordinasi dengan baik, tenaga kesehatan juga telah bekerja selama 24 jam dari H-15 sampai H+15 lebaran.

Demi menjaga kesehatan dan kebugaran para pemudik di musim mudik lebaran 2017, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyiagakan Posko Kesehatan yang tersebar di seluruh jalur mudik, mulai dari lintas Jawa, Bali hingga Sumatera.

Posko tersebut bisa dimanfaatkan para pemudik saat membutuhkan layanan kesehatan selama perjalanan mudik. Tercatat ada 3.826 posko yang disiagakan di puskesmas-puskesmas dan rumah sakit yang tersebar di sepanjang jalur mudik lebaran 2017. Posko tersebut meliputi 3.141 pos kesehatan dari Dinkes, 207 pos kesehatan dari KKP, 374 rumah sakit rujukan, dan layanan emergency sekitar 104 Public Safety Center (PSC) 119 serta ambulan roda 4 dan 2.



Kemenkes Bentuk Gugus Tugas Pengawasan Iklan Kesehatan

Demi melindungi masyarakat dari informasi yang menyesatkan, Kementerian Kesehatan bekerja lebih nyata dalam pengawasan iklan kesehatan. Setelah menyampaikan pengaduan langsung kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dan KPI Daerah DKI Jakarta, Kemenkes membentuk gugus tugas pengawasan iklan bersama pemangku kepentingan terkait. Pemangku kepentingan itu diantaranya Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Lembaga Sensor Film (LSF), KPI, KPI Daerah, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Kementerian Komunikasi dan

Informasi (Kominfo). Tujuan gugus tugas ini memperkuat pengawasan dari hulu hingga hilir iklan kesehatan.

Pada tahap pra produksi dan produksi, ada Dewan Periklanan Indonesia yang berwenang mengawasi proses pembuatan iklan yang dikerjakan Rumah Produksi. Demikian juga ketika iklan akan ditayangkan di media penyiaran, harus mendapatkan Surat Tanda Lolos Sensor dari LSF. Kemudian saat iklan di tayangkan di media penyiaran menjadi kewenangan pengawasan oleh KPI Pusat dan KPI Daerah. Iklan di media cetak

menjadi kewenangan Dewan Pers atau Serikat Perusahaan Surat Kabar (SPS), dan di media internet menjadi wilayah kewenangan dari Kominfo.

Selain dari aspek iklan kesehatan, Kementerian Kesehatan juga mendorong Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melakukan pembinaan dan bimbingan teknis. Seperti diketahui, Kemenkes bersama Dinkes Jakarta dan Suku Dinkes Jakarta Selatan melakukan teguran langsung dan bimbingan teknis lapangan ke tempat praktik Jeng Ana di Kalibata, pada tanggal 22 Juni 2017.



Seleksi CPNS Kemenkes

Pada tahun 2017, peluang karir menjadi aparatur sipil negara (ASN) kembali dibuka. Belasan ribu formasi di 60 Kementerian dan Lembaga dibuka secara serentak sejak 5 September 2017 melalui portal khusus sistem seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) nasional. Pada kesempatan ini, Kementerian Kesehatan membuka 1.000 formasi CPNS untuk penempatan di unit pelaksana teknis (UPT) yang ada di seluruh Indonesia, yaitu: Balai Besar Laboratorium Kesehatan; Balai Besar Kesehatan Paru Kesehatan Masyarakat; Balai Kesehatan Mata; Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan; Rumah Sakit Umum Pusat; Rumah Sakit Khusus; Rumah Sakit Jiwa; Kantor Kesehatan Pelabuhan; dan Politeknik Kesehatan.

Beberapa hal dalam persyaratan penerimaan CPNS di Kementerian Kesehatan yang cukup berbeda bila dibandingkan dengan persyaratan penerimaan CPNS Kementerian/Lembaga lainnya, yaitu: (1) kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan dalam formasi CPNS Kemenkes yang dibuka sebagian besar diperuntukkan bagi lulusan kesehatan, meskipun terdapat formasi non kesehatan, yakni Dosen untuk penempatan di Poltekkes Kemenkes; (2) pelamar tidak memiliki kebiasaan merokok. Inilah salah satu langkah kongkrit dari komitmen Kemenkes dalam melindungi dan menyehatkan masyarakat. Harapannya, CPNS Kemenkes yang akan diterima juga berkomitmen untuk selalu menjaga kesehatan mulai dari diri

sendiri; (3) tidak diperbolehkan untuk mengajukan pindah selama 5 (lima) tahun sejak diangkat sebagai CPNS sesuai dengan peminatan; (4) bagi pelamar yang berminat untuk ditempatkan di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), diutamakan laki-laki, bersedia bekerja dalam sistem shift, bersedia dan mampu melakukan pemeriksaan kapal dalam karantina baik di dermaga maupun di lepas pantai dengan sarana tangga tali dan tangga biasa, memiliki kemampuan berenang dan bahasa Inggris aktif.

Penyelenggaraan seleksi penerimaan CPNS Kementerian Kesehatan tahun 2017 GRATIS, tidak dipungut biaya apapun.



Simulasi Pandemi Influenza

Peningkatan kesiapsiagaannya seluruh jajaran Pemerintah Pusat dan Daerah sangat penting dilakukan. Hal tersebut untuk menyikapi munculnya suatu kedaruratan kesehatan. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan bersama instansi terkait melaksanakan simulasi kesiapsiagaan pandemi influenza A H7N9.

Simulasi Pandemi Influenza jenis H7N9 perlu dilakukan mengingat Indonesia berisiko menjadi episenter pandemi influenza, baik flu burung (H5N1), flu babi (H1N1) atau virus jenis H7N9 yang dikhawatirkan mewabah ke Indonesia. Simulasi ini dilaksanakan selama dua hari, 19 - 20 September 2017 di Graha Widya Bakti Puspitpek Serpong, Tangerang Selatan

Dalam simulasi ini diujicobakan beberapa kegiatan inti kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza H7N9, yakni Pilar Komando dan Koordinasi, Surveilans Epidemiologi, Respons Media, Intervensi Farmasi, Intervensi non Farmasi, Pengawasan Perimeter, Mobilisasi Sumber Daya, dan Komunikasi Risiko.



Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) hingga April 2015, sekitar 74.601 tenaga kesehatan (Nakes) masih memiliki kualifikasi pendidikan setara Jenjang Pendidikan Menengah (JPM) dan Jenjang Pendidikan Tinggi Diploma I (JPT-DI). Kementerian Kesehatan meluncurkan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan ke Diploma III (DIII).

Peluncuran program tersebut diresmikan oleh Menteri Kesehatan RI, Nila Moeloek di gedung Prof. Sujudi, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, pada 29 September 2017.



Eliminasi Filariasis

Bertepatan dengan acara peringatan Bulan Eliminasi Kaki Gajah (BELKAGA) tahun 2017 di Desa Jatisono Kabupaten Demak pada 7 Oktober 2017, Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M(K) menyerahkan sertifikat eliminasi Filariasis kepada 13 Kabupaten / Kota atas keberhasilan pengendalian penyakit kaki kajah di wilayahnya.

Ketiga belas wilayah tersebut, yaitu:

1) Kota Depok yang diterima oleh Walikota K.H. Mohammad Idris, MA; 2) Kota Dumai diterima oleh Walikota Drs. H. Zulkifli AS, M.Si; 3) Kota Gorontalo diterima Walikota H. Marten A. Taha, SE, M.Ec.Dev; 4) Kab. Belitung diterima oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten, dr. Suhandri, Sp.OG 5) Kab. Bangka Barat, diterima Wakil Bupati Markus, SH; 6) Kab. Lima Puluh Kota, diterima Bupati Ir. Irfendi Arbi, MP; 7) Kab. Parigi Moutong, diterima Bupati H. Samsurizal Tombolotutu;

8) Kab. Polewali Mandar, diterima oleh Kepala Dinas Kesehatan H. Suaib Nawawi, SKM, M.Kes; 9) Kab. Gorontalo, diterima oleh Bupati Prof. Dr. Ir. Nelson Pomalingo, M.Pd; 10) Kab. Gorontalo Utara, diterima Bupati Dr. Indra Yasin, SH, MH; 11) Kab. Pahuwato, diterima Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten, dr. H. Supandi M. Abdullah, M.Kes; 12) Kab. Enrekang, diterima Kepala Dinas Kesehatan Kab. Enrekang, dr. H. Marwan Ahmad Ganoko, Sp.PK; dan 13) Kab. Alor, diterima Bupati Drs. Amon Djobo.



Asia Pasific Food Forum (Eat) Gemari & Isi Piringku

Dengan mengusung semangat preventif-promotif, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan RI berinisiatif untuk menyelenggarakan Asia Pasifik Food Forum atau Forum Pangan Asia Pasifik yang pertama di Indonesia. Langkah ini diambil sebagai bukti komitmen Pemerintah untuk mewujudkan sistem kesehatan pangan berkelanjutan di kawasan Asia Pasifik. Melalui forum ini diharapkan dapat menjadi kesempatan bagi seluruh stakeholder untuk berkolaborasi, bertukar gagasan, melakukan aksi dan membentuk komitmen bersama untuk memicu transformasi sistem pangan regional.

Forum yang mempertemukan semua stakeholders di bidang kesehatan, lingkungan hidup dan sistem pangan seperti pemerintah, akademisi/ilmuwan, NGOs, politisi, dan pelaku bisnis dari berbagai negara ini dilaksanakan di Jakarta, pada 30-31 Oktober 2017.



Puncak Peringatan HKN Ke-53

Hari Kesehatan Nasional (HKN) diperingati setiap tanggal 12 November. Pada HKN tahun 2017, Kementerian Kesehatan lebih memfokuskan pada kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). “Sehat Keluargaku Sehat Indonesiaku” merupakan tema yang diusung pada peringatan HKN ke-53. Pemilihan tema sejalan dengan Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga yang menekankan keluarga sebagai bagian penting dalam mendorong masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat.



Puncak peringatan HKN ke-53 diselenggarakan pada 12 November 2017 di Car Free Day, Jakarta. Wakil Presiden RI, H.M. Jusuf Kalla; dan beberapa Menteri kabinet kerja turut hadir dalam puncak peringatan ini.

Pada puncak peringatan tersebut dilaksanakan beberapa rangkaian kegiatan seperti, karnaval sehat Germas yang diikuti oleh perwakilan dari KemenPAN RB, Bappenas, LAN, Kementerian Pariwisata, Kemhan, BNPB, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, BBPK, Bakamla, BNN, Kementerian KKP, Kementerian ESDM, RS Fatmawati dan Save The Children. Kegiatan

karnaval dimulai dari kawasan Silang Monas dan berakhir di Bundaran HI. Kemudian dilanjutkan dengan aktivitas fisik yakni senam bersama, dan pemecahan rekor MURI senam peregangan secara massal dengan peserta terbanyak, tercatat sebanyak 120 ribu orang mengikuti senam tersebut. Direktur Rekor MURI, Jaya Suprana bahkan menetapkan senam peregangan serentak itu sebagai rekor dunia. Selain senam peregangan, diselenggarakan pula bazar buah, sayur dan ikan, serta terdapat pula 10 tenda pemeriksaan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM) melalui pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkar perut,

tekanan darah, pemeriksaan gula darah dan pemeriksaan kolesterol bagi masyarakat secara gratis.

Di samping itu masih ada kegiatan-kegiatan lain, yakni sambutan Menkes pada para peserta gowes yang telah berhasil menaklukkan tantangan etape sepeda Tour De Sabang – Jakarta yang telah menempuh jarak 3.000 kilometer, video conference Menkes dengan 5 provinsi dan peluncuran maskot Germas, GABU (Garuda Bugar) Dengan semangat GERMAS, peringatan HKN ke-53 ini juga secara serentak dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia.

GABU
(GARUDA BUGAR)



Maskot berupa hewan burung garuda sebagai perlambangan negara Indonesia dan menggunakan pakaian olahraga (Topi sebagai pelindung kepala, T-shirt berkerah melambangkan santai namun terkesan rapi, celana olahraga dan sepatu untuk berjalan) khususnya jalan sehat, dimana jalan sehat sendiri merupakan event yang banyak dilakukan di Indonesia dan bisa dilakukan oleh seluruh kaula baik muda maupun tua (tidak

terbatas umur). Jalan sehat juga sering digunakan masyarakat Indonesia untuk menjaga badan agar tetap bugar, tentunya dengan semangat dari dalam diri sendiri sesuai dengan slogan “Sehat dimulai dari Saya!”

Warna yang digunakan menggunakan warna2 dari logo GERMAS itu sendiri yaitu biru, hijau, kuning dan merah secara berurutan. Bulu di tangan (sayap) juga memiliki

warna serupa, melambangkan penggunaan tangan untuk makan, dimana logo GERMAS sendiri memiliki makna sebagai makanan dan minuman air, sayuran, buah-buahan serta daging.



Indonesia Mampu Produksi Sten dan Balon Kateter

Menkes Nila Moeloek resmikan fasilitas produksi sten dan balon kateter PT. Dipa Global Medtek di Majalengka pada 27 November 2017. Perusahaan tersebut telah mendapatkan Sertifikat Produksi dari Kementerian Kesehatan untuk memproduksi sten dan balon dan kateter. Ini merupakan fasilitas produksi sten dan balon kateter pertama di Indonesia.

Sten dan balon kateter merupakan salah satu alat kesehatan dengan teknologi dan risiko tinggi, serta untuk memproduksinya diperlukan ketepatan dan ketelitian agar memenuhi standar keamanan, mutu dan kemanfaatannya.

Presiden telah menginstruksikan kepada 12 kementerian dan lembaga yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan. Melalui Inpres itu, kementerian dan lembaga terkait bisa saling bekerjasama agar pengembangan industri alat kesehatan bisa lebih cepat.



Kemenkes Berlakukan ORI Difteri di 3 Provinsi

Kementerian Kesehatan langsung merespon kejadian luar biasa (KLB) difteri di Indonesia yang terjadi pada November 2017. Langkah pertama yang dilakukan adalah memberlakukan Outbreak Response Immunization (ORI).

“Kalau ditemukan satu kasus klinis atau kasus difteri yang dinyatakan positif secara laboratorium, maka dinyatakan KLB. Dalam hal ini KLB sebenarnya *warning* bukan wabah, artinya setelah menemukan ini (kasus difteri) harus melakukan tindakan pencegahan dengan imunisasi melalui ORI (Outbreak Response Immunization),” kata Menkes Nila Moeloek di Kediannya di Jakarta Selatan, Minggu (10/11/2017).

Sebagai respon cepat atas KLB Difteri ini, ORI langsung diberlakukan di tiga propinsi yang dinilai memiliki potensi transmisi penyakit menular masih tinggi yakni, Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Tiga provinsi ini memiliki potensi transmisi penyakit menular yang masih tinggi karena didorong oleh padatnya jumlah penduduk, jumlah dan tingginya mobilisasi di tiga provinsi tersebut. Selain itu, ketiga provinsi tersebut memiliki kasus yang banyak dan dilaporkan kelompok usia dewasa juga terkena. Di DKI Jakarta ada 22 kasus dilaporkan.

Tingkat penularan difteri, sangat tinggi karena penularan bakteri dapat terjadi melalui percikan ludah baik saat bersin atau ketika batuk. Kemenkes menyarankan untuk melakukan ORI atau pemberian imunisasi ulang secara massal kepada seluruh wilayah yang terdapat kasus difteri dan ini dilakukan sebanyak 3 putaran. Jarak pemberian putaran pertama dan kedua adalah 1 bulan, sedangkan jarak antara putaran kedua dan ketiga adalah 6 bulan. Putaran pertama dilaksanakan pada 11 Desember 2017, dilanjutkan pada 11 Januari dan 11 Juli 2018.



Kemenkes Libatkan 1.963 Petugas Penyelenggara Kesehatan Haji 2017

Kementerian Kesehatan mengerahkan 1.963 petugas untuk membantu penyelenggaraan kesehatan haji tahun 2017. Menurut Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan, Dr. dr. Eka Jusup Singka, M.Sc, dari 1.963 petugas yang dilibatkan terdiri dari tenaga kesehatan kloter atau Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) sebanyak 1.521 orang yang terdiri dari 507 dokter dan 1.014 perawat. TKHI dari dokter dan perawat ini selalu menyertai jemaah haji dalam 507 kloter penerbangan, sehingga setiap keluhan jemaah haji langsung mendapat penanganan dari tenaga kesehatan yang menyertainya.

Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) bidang kesehatan sebanyak 268 orang. Tenaga ini mendapat jenis penugasan Tim Asistensi 8 orang, Tim Manajerial 13 orang, Tim Kuratif dan Rehabilitatif (TKR) 154 orang, Tim Gerak Cepat (TGC) 75 orang dan Tim Promotif dan Preventif (TPP) 18 orang. Kemenkes juga merekrut 174 orang Tenaga Pendukung Kesehatan (TPK). Mereka adalah para WNI yang bermukim di Arab Saudi. Dalam penugasannya mereka ada yang bertugas sebagai pendamping jemaah sakit, pengemudi ambulans, pengemudi operasional, pengemudi TPP, TKR, TPP, administrasi perhajian, perawat, tenaga rekam medis, tenaga kebersihan, tenaga perbekalan kesehatan dan mekanik.



Penghargaan



Masyarakat
menuju

Indonesia

sebas

sis

017

laiko...arta





Penghargaan Kategori Kementerian/ Lembaga dengan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terbaik Kategori Kementerian/Lembaga Pembinaan Teknis Kinerja Pengelolaan BLU Terbaik

Pada 14 Maret 2017 Kementerian Kesehatan RI menerima 2 penghargaan sekaligus yakni penghargaan kategori Kementerian/Lembaga dengan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbaik dan kategori Kementerian/Lembaga Pembinaan Teknis Kinerja Pengelolaan BLU terbaik. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi setinggi-tingginya pada kinerja kementerian negara atau lembaga di Indonesia.

Pada capaiannya, 5% alokasi APBN untuk Kemenkes diimbangi dengan upaya promotif preventif dan menguatkan layanan kesehatan primer. Output yang dihasilkan pada 2016, yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk 91,1 juta penerima.

Pada 2016, Indonesia melalui Kemenkes telah mengeliminasi malaria di 247 kabupaten/kota, melaksanakan imunisasi di 80,7% kabupaten/kota, menurunkan stunting ke 26,1%. Selain itu pemenuhan imunisasi dasar lengkap untuk 4 juta bayi di bawah satu tahun serta menyediakan obat dan vaksin di Puskesmas sebesar 81,5%.

Kementerian Kesehatan RI Raih BKN Award

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mendapat penghargaan dalam ajang Badan Kepegawaian Negara (BKN) Award yang memberikan penghargaan bagi pengelola kepegawaian terbaik sekaligus sebagai bentuk apresiasi terhadap pengelola kepegawaian pusat dan daerah. Dalam gelaran tersebut Kemenkes RI didaulat menjadi Pengelola Kepegawaian Terbaik Kedua Tingkat Kementerian Besar, bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) ada di posisi pertama, bersama-sama

Kementerian Keuangan di posisi ketiga, Kementerian Perhubungan di posisi keempat, dan Kementerian Pertanian di posisi kelima.

Pemberian penghargaan BKN Award merupakan salah satu agenda dalam rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2017, Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang dibuka oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla di Jakarta Convention Center (JCC), pada tanggal 10 Mei 2017.





Kemenkes Pecahkan Rekor Muri “Ketuk Pintu 500.000 Rumah Untuk Penemuan Kasus TB”

Menkes Nila F. Moeloek menerima penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) atas rekor Edukasi dan Skrining Tuberkulosis secara Serentak di Lokasi dan Peserta Terbanyak pada 1 April 2017, di Gedung Balai Kota DKI Jakarta. Penghargaan diberikan pada puncak peringatan Hari TB Sedunia dengan tema Gerakan Masyarakat Menuju Indonesia Bebas Tuberkulosis.

Edukasi dan skrining TB dilakukan dengan gerakan Ketuk Pintu. Gerakan ini sudah dicanangkan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Maret 2015, sejak saat itu kegiatan mengetuk satu-per satu rumah penduduk telah dilaksanakan di banyak tingkat desa dan kecamatan. Setiap tahun gerakan Ketuk Pintu semakin ditingkatkan dan digalakkan untuk memperkuat penemuan kasus TB secara aktif atau active case finding. Tahun ini program ketuk pintu berhasil memecahkan rekor MURI.

Tahun 2017, kegiatan Ketuk Pintu telah dilaksanakan serentak di 34 Provinsi. Pada tanggal 6-20 Maret 2017 para Kader Kesehatan dibantu LSM, tenaga kesehatan dan organisasi masyarakat lainnya melakukan kegiatan Ketuk Pintu. Tujuannya tidak lain lagi untuk meningkatkan cakupan penemuan kasus TB secara aktif dan masif melalui pendekatan keluarga.

Pelaporan sampai tanggal 27 Maret 2017 telah berhasil diketuk 565.798 rumah. Dari kunjungan ketuk pintu ini, telah berhasil dilakukan skrining dan edukasi TB pada 1.590.529 orang dan ditemukan terduga TB 91.049 orang, sebanyak 4.950 orang di antaranya terkonfirmasi TB. Capaian ini telah memecahkan rekor ketuk pintu MURI yang menargetkan 500.000 rumah.

Bila dibandingkan dengan insiden pada keseluruhan masyarakat yang dilaporkan sebesar 395/100.000 (WHO Global Report 2016), hal ini menunjukkan bahwa pendekatan melalui Ketuk Pintu sangat efektif untuk capaian Case Detection Rate (CDR) di atas 70%.

Kegiatan Ketuk Pintu merupakan gerakan yang selaras dengan GERMAS dan Pendekatan Keluarga Sehat. Kedepannya gerakan ini akan menjadi suatu kegiatan terpadu dan semakin memperkuat Keluarga Sehat.



Kemenkes Terima Penghargaan Terkait Pengelolaan Keuangan

Kementerian Kesehatan RI mendapat penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI terkait pengelolaan keuangan tahun anggaran 2016 di Gedung BPK RI, Jakarta pada 23 Mei 2017. Penghargaan tersebut sebagai bukti bahwa pengelolaan keuangan Kemenkes dilakukan dengan benar dan transparan.

Laporan keuangan tahun anggaran 2016 ini meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.



ANRI Award 2017: Kemenkes Jadi Unit Kearsipan Kementerian Terbaik Nasional

Di penghujung peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan RI mendapatkan predikat sebagai Unit Kearsipan Terbaik Tingkat Nasional untuk kategori Kementerian pada pemberian penghargaan Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI AWARD 2017 yang diselenggarakan di salah satu auditorium hotel di kawasan Ancol, Jakarta, pada 17 Agustus 2017 malam.

Trophy dan piagam penghargaan diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, SE, M.Si, didampingi Kepala ANRI, Drs. Mustari Irawan, MPA, dan diterima oleh Sekretaris Kementerian Kesehatan RI, dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes.



NCC Raih Penghargaan Top 40 Pelayanan Inovasi

Kementerian Kesehatan melalui National Command Center (NCC) 119 mendapat penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017 di Stadion Manahan Solo. Penghargaan Top 40 Inovasi tersebut diberikan langsung oleh Menko PMK kepada Menteri/Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota dan Direktur Utama BUMN.

Pemberian penghargaan ini merupakan salah satu rangkaian acara Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental yang diadakan di kota Surakarta dari tanggal 25 - 27 Agustus 2017.



Menkes Raih Penghargaan Best Communicator

Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek mendapat penghargaan Best Communicator kategori Menteri dari PR Indonesia. Penghargaan diterima oleh Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes RI Oscar Primadi, pada acara Jambore PR Indonesia (Jampiro) ke-3 di Yogyakarta tanggal 25 Agustus 2017. Penghargaan diserahkan oleh CEO PR Indonesia Asmono Wikan dan Komisaris Utama PR Indonesia Ahmad Jauhar.



Menkes Terima Penghargaan Penyelenggaraan Kesehatan Haji

Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M(K) menerima dua plakat penghargaan dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi atas keberhasilan penyelenggaraan kesehatan haji Indonesia tahun 1438H/ 2017M. Penghargaan diserahkan melalui Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes RI, DR. dr. H. Eka Jusup Singka, M.Sc, kepada Menkes dalam kegiatan Evaluasi Nasional Penyelenggaraan Kesehatan Haji di salah satu hotel di Kawasan Pancoran Jakarta Selatan, 1 November 2017.

Kedua penghargaan tersebut, yaitu:

- (1) Penghargaan Health Awareness Ambassador Program in Hajj Season 1438H for Indonesia Hajj Medical Mission 2017 yang sebelumnya telah diberikan oleh Chief of Health Awareness Ambassadors Program in Hajj, Muneera Khaled Balahmar kepada dr. Etik Retno Wiyati di gedung KKHI Mekkah, 26 September 2017; dan
- (2) Penghargaan atas keberhasilan Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Mekkah dalam mendukung Program Kesehatan Haji tahun 1438H yang sebelumnya diberikan Dirjen Pelayanan Kesehatan Daerah Mekkah dr. Musthafa bin Jamil Baljun kepada dr. Melzan selaku Kasie KKHI Mekkah di Auditorium RS Wiladah, Mekkah, 26 September 2017.



Terbaik Dalam Pengelolaan BMN, Kemenkes Terima BMN Award

Kementerian Kesehatan mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan untuk katagori Peningkatan Tata Kelola Berkesinambungan (continuous improvement). Penghargaan diberikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Untung Suseno Sutarjo di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan pada acara Refleksi dan Apresiasi Pengelolaan BMN pada Kementerian Tahun 2016, Jakarta, pada 1 November 2017.



Kemenkes Raih Penghargaan Dari PPM Manajemen

Kementerian Kesehatan mendapat penghargaan untuk kategori Komitmen Pengembangan Organisasi Terintegrasi dari PPM Manajemen. Selain Kemenkes, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Energid an Sumber Daya Mineral dan Kementerian Keuangan turut mendapatkan penghargaan untuk kategori yang sama. Penghargaan diterima oleh drg. Oscar Primadi, MPH, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat sebagai wakil dari Kemenkes pada 23 Agustus 2017.



Menkes Nila Moeloek Mendapat Anugerah Bintang Bhayangkara Utama Polri

Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M(K) mendapat anugerah tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Utama dari POLRI atas jasanya dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat, Menteri Kesehatan berperan besar mendukung POLRI dalam penyediaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, baik dalam penyediaan posko kesehatan saat arus mudik, maupun tanggap darurat dalam kondisi bencana. Selain itu Menkes juga dinilai berperan besar dalam membantu POLRI dalam mengamankan produk obat dan makanan, serta produk konsumsi lain demi kesehatan dan keselamatan masyarakat.



Kemenkes Raih 2 Penghargaan Dari KPK

Kementerian Kesehatan menerima penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam acara puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2017 yang di gelar di Jakarta (12/12). Acara yang sudah diselenggarakan sebanyak 12 kali di Indonesia ini kembali memberi penghargaan kepada instansi pemerintah, BUMN, maupun swasta yang turut mendukung gerakan pemberantasan korupsi.

Kementerian Kesehatan tahun ini mendapatkan dua penghargaan bergengsi yaitu sebagai Lembaga dengan Implemtasi e-LHKPN terbaik tahun 2017 dengan kategori Pilot Project terbaik tahun 2017 dan sebagai Kementerian dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik. Penghargaan ini diberikan langsung kepada Menteri Kesehatan Nila Moeloek oleh Ketua Umum Komisi Pemberantasan Korupsi, Agus Raharjo.

Kemenkes dianggap telah memenuhi kriteria yang ditentukan oleh KPK yaitu memenuhi 90% tingkat kepatuhan LHKPN sehingga dapat menerima penghargaan tersebut. LHKPN merupakan salah satu alat yang digunakan untuk pencegahan korupsi sehingga tujuan pemberian penghargaan ini adalah sebagai bentuk apresiasi dari KPK kepada instansi yang telah melakukan pengelolaan LHKPN di lingkungan instansinya secara baik.



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

ISBN 978-602-416-369-3

